**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

**2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

**2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Padang Pariaman dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat, memiliki peran yang strategis sebagai penyangga Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Sebagai daerah penyangga ibukota provinsi, Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas dan fungsi berbeda dengan kabupaten kota lainnya. Hal ini mengakibatkan bahwa tantangan dan permasalahan yang dimiliki relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lainnya.

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, perlu memperhatikan kondisi dan potensi eksisting yang ada termasuk posisi geografis. Hal ini dimaksudkan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang sehingga keberlanjutannya dan kelestarian lingkungan terjaga dengan baik.

Kabupaten Padang Pariaman secara posisi astronomis terletak antara 00 11’ – 00 49‘ Lintang Selatan dan 980 36‘ – 1000 28‘ Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 1.328,79 Km2 dan panjang garis pantai 42,11 Km. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, Kabupaten Padang Pariaman terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) kecamatan dengan kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 Km2, sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, yakni 25,56 Km2.

Rata-rata curah hujan secara keseluruhan untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 adalah sebesar 230 milibar (mb), dengan rata-rata hari hujan sebanyak 13 hari per bulan. Temperatur rata-rata untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah 25,68 derajat celcius dengan kelembaban relatif 86 persen dan tekanan udara rata-rata 996,66 milibar (mb)

Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah :

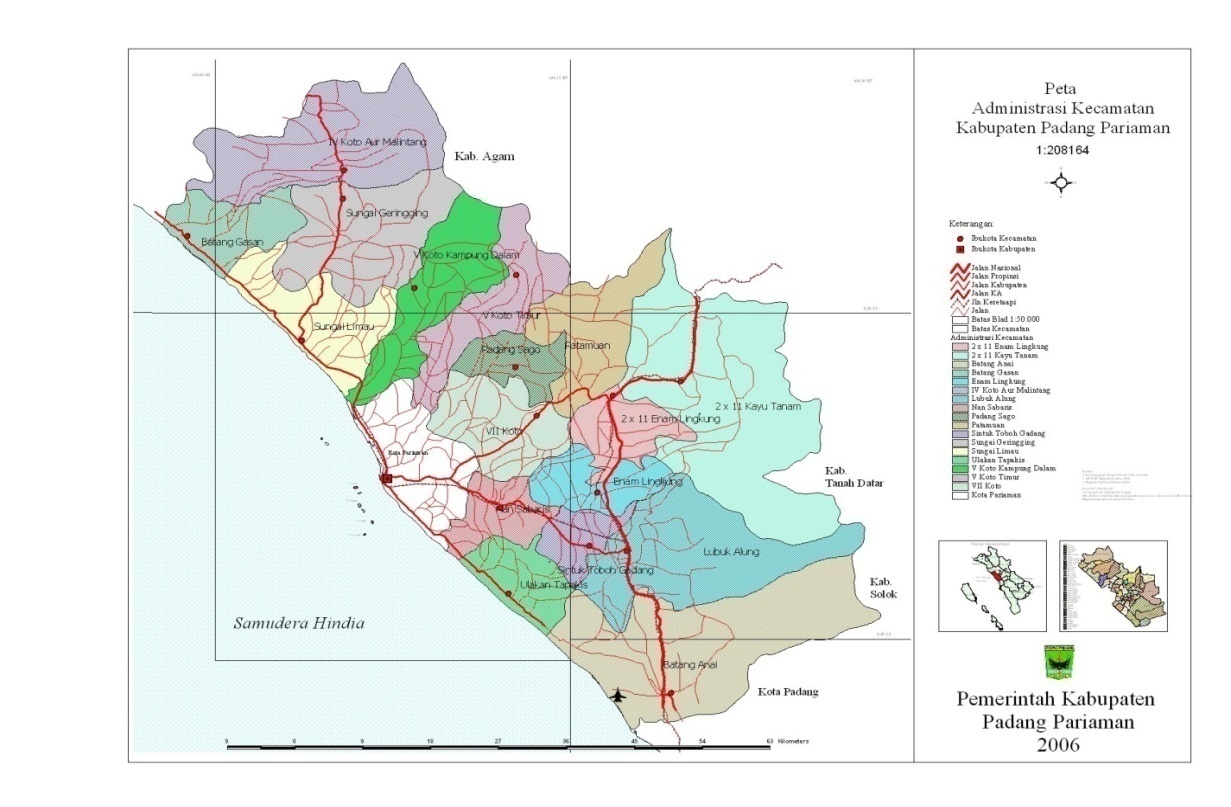
* Sebelah Utara : Kabupaten Agam
* Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Datar dan Kab. Solok
* Sebelah Selatan : Kota Padang
* Sebelah Barat : Kota Pariaman dan Samudera Indonesia

Untuk lebih jelasnya wilayah admisnitratif Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :

**Gambar 2.1**

**Peta Wilayah Administratif**

**Kabupaten Padang Pariaman**



*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

**2.1.1.2. Kondisi Topografi**

Wilayah Kabupaten Padang Pariaman terletak pada daratan Pulau Sumatera dan memiliki 2 (dua) pulau kecil (pulau Pieh dan pulau Bando). Dilihat dari topografi, wilayah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 40 persen dataran rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah ke pantai dan 60 persen daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan dengan ketinggian 100–1.500 meter di atas permukaan laut.

Keadaan topografi Kabupaten Padang Pariaman berupa daratan seluas 1.328,79 Km2 atau 56,10 persen dari wilayah datar dan landai dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Daerah datar landai terletak pada bagian Barat yang mendekati pantai. Sedangkan sisanya 43,90 persen merupakan daerah bergelombang agak curam dan sangat curam dengan ketinggian 100-1.500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daerah bergelombang dan dataran tinggi (agak curam-curam – sangat curam) terdapat pada bagian Timur dan Utara. Pada daerah perbatasan dengan Kabupaten Solok, Tanah Datar dan Agam merupakan daerah gugusan Bukit Barisan yang membujur sepanjang bagian Barat Pulau Sumatera.

**2.1.1.3. Kondisi Geologi dan Tata Lingkungan**

Secara geologis Kabupaten Padang Pariaman terletak pada 2 (dua) jalur patahan lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia dan topografi Padang Pariaman yang dilalui oleh banyak anak-anak sungai dan merupakan kawasan yang rawan bencana. Bentuk bencana yang pernah terjadi dan mungkin terjadi di Kabupaten Padang Pariaman identik dengan kondisi alam tersebut yaitu bencana banjir tanah longsor, angin badai/puting beliung abrasi pantai, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Faktor alam lainnya, Kabupaten Padang Pariaman juga termasuk rawan bencana yang timbul akibat ulah manusia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sosial – budaya yang relatif kurang memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta kelalaian dari manusia yang berakibat bencana. Beberapa bencana yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman akibat ulah manusia seperti kebakaran, banjir dan tanah longsor.

Secara kumulatif, bencana yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia cenderung meningkat yang membawa dampak kerugian dan kerusakan serta korban jiwa meningkat pula. Disamping itu, berdasarkan analisis dan prediksi para ahli dan peneliti bahwa wilayah sepanjang pantai pantai Barat pulau Sumatera berpotensi dilanda bencana tsunami, mengingat pantai Barat Sumatera merupakan jalur penujaman (\*Subduction Zone) sebagai penyebab terjadinya gempa. Bilamana terjadi dislokasi atau pematahan dibawah samudera, maka akan dapat berpotensi terjadinya gelombang tsunami tersebut.

**2.1.1.4 Kondisi Klimatologi**

Keadaan iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh angin darat dan curah hujan mencapai rata-rata 427,70 mm/bulan sepanjang tahun 2014 serta suhu udara berkisar antara 260C – 310C. Iklim wilayah Kabupaten Padang Pariaman termasuk iklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Suhu udara berkisar antara 260C – 310C. Suhu udara tertinggi jatuh pada bulan Mei, sedangkan suhu udara terendah terdapat pada bulan September. Dalam beberapa tahun terakhir setiap tahunnya udara di Kabupaten Padang Pariaman juga dipengaruhi oleh kabut asap kiriman dari daerah tetangga. Kelembaban udara rata-rata 86,75% dengan kecepatan angin rata-rata 2,14 knot/jam. Sedangkan rata-rata suhu maksimum 31,080C dan rata-rata suhu minimum yaitu 21,340C dengan curah hujan tercatat rata-rata 293,11 mm/tahun. Untuk lebih jelasnya temperatur di Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu tahun 2011 -2015 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**

**Suhu, Kelembaban Relatif, Kecepatan Angin dan Tekanan Udara**

**Di Kabupaten Padang Pariaman**

| **Tahun** | **Suhu (oC)** | **Kelembaban Relatif (%)** | **Kecepatan Angin (Knot)** | **Tekanan Udara (Nbs)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 25,14 | 86,57 | 1,8 | 996 |
| 2012 | 25,51 | 87,08 | 1,8 | 996,27 |
| 2013 | 25,13 | 86,91 | 1,8 | 996,57 |
| 2014 | 25,67 | 85,35 | 1,8 | 995,41 |
| 2015 | 25,74 | 85,58 | 1,8 | 996,66 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2011-2015*

**2.1.1.5. Kondisi Hidrologi**

Berdasarkan karakteristik geologi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, kondisi hidrologi terdiri atas hidrologi air permukaan dan hidrologi air tanah. Hidrologi air permukaan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai potensi ketersediaan air permukaan sebesar ± 14,3 miliyar m3. Kabupaten Padang Pariaman dilalui oleh 13 (tiga belas) sungai. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman untuk mendukung pekerjaannya yang mayoritas merupakan petani dengan luas lahan untuk pertanian adalah 27.082,5 dari 132.878 Ha total lahan yang dipergunakan untuk segala jenis peruntukan lahan.

Kabupaten Padang Pariaman termasuk kedalam Satuan Wilayah Sungai (SWS) Anai Sialang yang mempunyai daerah tangkapan air seluas 12.089 km2. Potensi ketersediaan air tanah masing-masing satuan wilayah sungai terdiri dari air tanah yang mengalir di dasar sungai sebagai “base flow” dan air tanah yang saat ini dieksploitasi melalui sumur pompa PDAM, ,swasta dan Proyek Pengembangan Air Tanah. Air tanah yang mengalir sebagai “base flow” sebesar ± 1,70 miliyar m3 yang melalui SWS Anai Sualang. Kabupaten Padang Pariaman dilalui oleh 11 buah sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Batang Mangau sepanjang 46 km serta Sungai Batang Anai dengan panjang 46 km. Sungai yang memiliki panjang terkecil dibandingkan dengan sungai-sungai lainnya di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Batang Kamumuan dan Batang Piaman dengan panjang sungai yaitu 12 km. Secara ekonomis sungai-sungai ini merupakan pendukung bagi kegiatan irigasi dan untuk budidaya ikan yang diusahakan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Daerah rawan longsor dijumpai di daerah-daerah yang memiliki lereng lebih dari 45% dengan tekstur tanah berpasir, galir dan patahan, seperti Kecamatan Sungai Geringging, 2 x 11 Enam Lingkung, Batang Gasan, V Koto Kampung Dalam dan Kecamatan Sungai Limau serta Kec. IV Koto Aur Malintang. Potensi longsor dapat juga disebabkan oleh lapisan kedap air yang dapat menjadi longsoran. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini :

**Tabel 2.2**

**Nama Sungai, Daerah yang Dilalui dan Panjang Sungai**

**di Kabupaten Padang Pariaman**

| **No** | **Nama Sungai** | **Daerah yang Dilalui (Kecamatan)** | **Debit**  **( m/detik)** | | **Panjang Sungai (km)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | Min |
| 1 | Batang Sungai Limau | Sungai Geringging - Sungai Limau | 45,00 | 7,77 | 14,00 |
| 2 | Batang Kamumuan | Sungai Geringging - Sungai Limau | 34,97 | 5,62 | 12,00 |
| 3 | Batang Paingan | Sungai Geringging - Sungai Limau | 36,00 | 3,98 | 16,00 |
| 4 | Batang Gasan | IV Koto Aur Malintang - Sungai Limau - Batang Gasan | 60,00 | 9,20 | 20,00 |
| 5 | Batang Sungai Sirah | Sungai Geringging - Sungai Limau | 45,00 | 7,32 | 18,00 |
| 6 | Batang Naras | V Koto Kampung Dalam - Sungai Limau | 33,80 | 0,91 | 20,00 |
| 7 | Batang Piaman | VII Koto Sungai Sarik – Pariaman | 19,40 | 2,62 | 12,00 |
| 8 | Batang Mangau | Patamuan - VII Koto Sungai Sarik - Nan Sabaris | 55,90 | 7,57 | 46,00 |
| 9 | Batang Ulakan | 2x11 Enam Lingkung - Nan Sabaris - Ulakan Tapakis | 60,00 | 36,00 | 19,00 |
| 10 | Batang Anai | 2x11 Kayu Tanam - Lubuk Alung - Batang Anai | 70,00 | 25,00 | 54,60 |
| 11 | Batang Tapakis | Lubuk Alung - Sintuk Toboh Gadang - Nan Sabaris - Ulakan Tapakis | 42,50 | 2,88 | 46,00 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

* + - 1. **Pola Penggunaan Lahan**

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi :

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas:
   * + - 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
   1. Kawasan perlindungan setempat;
   2. Kawasan RTH;
   3. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
   4. Kawasan rawan bencana;
   5. Kawasan lindung lainnya.

Berdasarkan kebijakan sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, di kawasan Kecamatan Batang Gasan ditetapkan Kawasan Konservasi Suaka Pesisir (KKSP). Dalam KKSP ini terdapat penangkaran penyu dan hutan bakau.

1. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas :
   * + - 1. Kawasan hutan rakyat : berdasarkan data yang diperoleh di Padang Pariaman tidak terdapat hutan produksi kecuali hutan rakyat seluas lebih kurang 42.120 Ha yang tersebar di bagian timur Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, 2x11 Kayu Tanam, di bagian utara Kecamatan Patamuan, V Koto Timur, V Koto Dalam, Sungai Geringging dan bagian timur Kecamatan Aur Melintang. Namun kondisi hutan sebagian mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian dan sebagian menjadi kritis.
         2. Kawasan pertanian : Kawasan pertanian berdasarkan kepmentan No. 41 tahun 2009, dibedakan menjadi kawasan pertanian pangan lahan kering dan basah, pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kabupaten Padang Pariaman didominasi oleh kegiatan sektor pertanian (± 22,57% dari seluruh luas wilayah) berupa sub sektor/kegiatan TPLB dan TPLK, perladangan/kebun campuran, perkebunan, dan tambak. Mengingat tingkat kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah, maka luas lahan yang tersedia masih dapat di kembangkan lebih jauh untuk kegiatan sektor pertanian. Berdasarkan kondisi eksisting dan kesesuaian lahan, pengembangan kawasan pertanian direncanakan sebagaimana penjelasan di bawah ini :
       1. *Tanaman Pangan Lahan Kering;* dalam ilmu pertanian jenis pertanian ini dikenal dengan pertanian tanpa genangan atau unirrigated land, seperti tanaman palawija, kacang-kacangan, jagung dan lain-lain. Secara eksisting jenis tanaman pertanian lahan kering yang bertumbuh di adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau dan kacang tanah. Jenis pertanian lahan kering ini dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian lahan maupun fakta lapangan. Sesuai dengan kesesuaian lahan, potensi eksisting dan program sektoral, TPLK di Kabupaten Padang Pariaman dikembangkan hampir di seluruh kecamatan.
       2. *Tanaman Pangan Lahan Basah;* Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu lumbung padi, setidak-tidaknya untuk kawasan Padang dan sekitarnya. Selain menjadi penciri wilayah disepanjang koridor jalan nasional lebih penting dari itu keberadaan kawasan pertanian padi sawah merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional. TPLB di wilayah perencanaan dikembangkan di kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Ulakan Tapakis, Nan Sabaris, VII Koto Sungai Sariak, 2x11 Kayu Tanam, V Koto Kampung Dalam, Sungai Geringging dan Koto Aur Malintang. Lahan pertanian sawah yang beririgasi teknis dikembangkan di Batang Anai, Lubuk Alung dan Ulakan Tapakis.
       3. *Tanaman Hortikultura;* Selain Kabupaten Solok, Padang Panjang dan Agam, Padang Pariaman merupakan salah satu sumber penghasil sayur mayur yang dikirim ke Kota Padang, seperti bayam, kangkung, mentimun dan buah-buahan (terutama manggis dan mangga). Lahan pertanian hortikultura dikembangkan pada lahan subur seperti Batang Anai, Lubuk Alung, 2x11 Kayu Tanam, dan Sungai Geringging.
          1. Kawasan perkebunan : Komoditas unggulan perkebunan kabupaten Padang Pariaman adalah Kelapa dan Kakao. Kedua jenis tanaman ini berkembang di wilayah utara kawasan perencanaan. Kedepan direncanakan Sungai Geringging sebagai sebagai sentra pengembangan Kakao dan pengolahan kelapa. Pengembangan Kakao meliputi kecamatan Lubuk Alung, Sitoga, Enam Lingkung, V Koto Dalam, Sungai Limau dan Sungai Geringging. Sedangkan kelapa akan dikembangkan di kecamatan Sitoga, Ulakan Tapakis, V Koto Kampung Dalam, Sungai Geringging, V Koto Aur Melintang, Sungai Limau, Batang Gasan.
          2. Kawasan perikanan : Perikanan yang akan dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman adalah perikanan tangkap dan budidaya. Pengembangan perikanan tangkap (laut) akan diarahkan di Sungai Limau dan Batang Anai. Sementara itu untuk perikanan budidaya akan dikembangkan di Kecamatan Lubuk Alung, 2x11 Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sariak dan kecamatan Patamuan.
          3. Kawasan pertambangan : Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan negara (WPN).
2. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah Pusat melalui koordinasi dengan pemerintah Provinsi.
3. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota, sesuai pasal 21, UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan.

Adapun kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah :

1. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
5. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan/atau merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
6. Wilayah pencadangan negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusahakan sebagaian luasnya statusnya berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Perubahan status WPN menjadi WPUK dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
7. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
8. Sumber devisa negara;
9. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
10. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
11. Daya dukung lingkungan dan/atau;
12. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Bahan galian/tambang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berupa bahan bangunan dan bahan industri yang dikategorikan sebagai bahan galian golongan C yang tersebar hampir merata di seluruh Kecamatan yang ada di Wilayah ini. Adapun beberapa jenis bahan galian tersebut adalah :

1. Tanah uruk berbatu yang terdapat di Kec. Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau, Sungai Geringging, dan IV Koto Aur Malintang. Dengan cadangan sebesar 2.975.000 m3 dan produksi 180.000 m3;
2. Obsidian atau batu gelas yang terdapat di Kec. IV Koto Aur Malintang dengan cadangan sebesar 257.000 m3 yang baru dihasilkan sebanyak 10.000 m3;
3. Batu apung atau perlit juga terdapat di Kec. IV Koto Aur Malintang dengan cadangan sebesar 140.000 m3 dan yang sudah diproduksi baru 5.000 m3 ;
4. Trass pasiran yang terdapat di Kec. Sungai Geringging dengan cadangan sebesar 75.000 m3;
5. Trass yang terdapat di Kec. Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, 2 x 11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau, Batang Gasan, Sungai Geringging dan VI Koto Aur Malintang dengan jumlah cadangan sebesar 4.190.000 m3 dan yang telah diproduksi baru mencapai 18000 m3;
6. Trass berbatu apung yang terdapat di Kec. VII Koto Sungai Sarik, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau dan Sungai Geringging dengan jumlah cadangan sebesar 1.045.000 m3 dan yang telah diproduksi baru mencapai 25.000 m3;
7. Sirtukil yang terdapat di Kec. Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris, 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, Padang Sago, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau dan Sungai Geringging dengan jumlah cadangan sebesar 2.635.000 m3 dengan jumlah produksi sebesar 170.000 m3;
8. Andesit yang terdapat di Kec. Lubuk Alung, 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam dan Patamuan dengan cadangan sebesar 1.185.000 m3 dan yang sudah di produksi sebesar 45.000 m3;
9. Tanah liat terdapat di Kec. Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur dan Sungai Limau dengan jumlah cadangan sebesar 785.000 m3 dan yang sudah di produksi sebesar 90.000 m3.
   * + - 1. Kawasan industry, Pengembangan industri di Kabupaten Padang Pariaman diarahkan pada industri pengelolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan setempat disamping memanfaatkan posisi strategis sebagai buffer dari Kota Padang. Posisi strategis tersebut telah memberikan indikasi kuat seperti bergiatnya 3 perusahaan besar; yaitu PT. Coca Cola, PT. Bumi Sari Mas Indonesia, PT. Sumatera Tropical Specees, Sedangkan perusahaan - perusahaan yang masuk dalam kawasan Padang Industrial Park (PIP) yang terletak di Nagari Kasang (Kecamatan Batang Anai) adalah PT. Usaha Inti Padang (pengolahan sawit), PT. Andalas Lumber Product (pengolahan kayu ekspor), PT. Jaya Centricon (Industri Beton), PT. Prizaco Gasindo (pengisian dan pengolahan gas). Demikian pula terdapat Koperasi Unit Desa Mina Sinar Laut yang mengelola pabrik ES balok (Kec. Sungai Limau), serta Pengolahan Air Minum Kemasan (PT. Statika Mitra Sarana dan PT. Aqua Wibawa) yang berada di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Saat ini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sedang mengusulkan kawasan ini dikembangkan dan ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan terminal barang ( dry port ) sebagai bagian dari peran yang diambil oleh Padang Pariaman dalam konstelasi regional berkenaan dengan sistem lalu lintas barang, dimana posisi kawasan ini menjadi simpul antara wilayah luar dengan daerah- daerah di Sumatera Barat. Untuk memenuhi kebutuhan akan pengembangan kawasan industri bahkan juga direncanakan pengembangan pembangunan kawasan industri baru di sepanjang koridor Jalan Lingkar Duku-Sicincin.
         2. Kawasan pariwisata, Salah satu kawasan wisata yang populer saat ini di Sumatera Barat adalah Malibou Anai Resort yang berdekatan dengan air terjun lembah Anai. Objek Destinasi Tujuan Wisata yang dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi wisata alam, budaya, minat khusus seperti Lubuk Nyarai, Pantai Arta, Pemandian Tirta Alami, Panorama Gunung Tigo, Lubuk Bonta, makam Syeh Burhanuudin, Tiram dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya dijabarkan pada tabel 2.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3**

**Objek Wisata di Kabupaten Padang Pariaman**

| **No** | **Kecamatan** | **Lokasi** | **Lokasi** | **Jenis** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Batang Anai | Singa Pasar Usang | Batang Anai | Wisata Alam |
| Candi Bukit Raf | Pasar Usang | Wisata Budaya |
| Gosong Muara Anai | Katapiang | Wisata Alam |
| Panorama Bukik Apik | Lubuak Apik | Wisata Alam |
| Lubuk Kandih | Batang Anai | Wisata Alam |
| 2. | Lubuk Alung | Pemandian Tapian Puti | Sikabu | Wisata Alam |
| Lubuk Nyarai | Sikabu | Wisata Air Terjun |
| Pincuran Tujuah | Koto Buruak | Wisata Alam |
| Lubuk Cimantung | Pasir Pauh | Wisata Alam |
| Goa Salibutan | Salibutan | Wisata Alam |
| Masjid IV Lingkung | Lubuk Alung | Wisata Sejarah |
| 3. | Sintuk Toboh Gadang | Benteng Jepang | Sintuk | Wisata Sejarah |
| Tugu Batas Renville | Sintuk | Wisata Sejarah |
| Makam Pejuang 45 | Sintuk | Wisata Sejarah |
| 4. | UlakanTapakis | Makam Syeh Burhanuddin | Ulakan | Wisata Budaya |
| Pantai Tirta Bahari | Tiram Tapakis | Wisata Pantai |
| Pantai Tiram Ulakan | Tiram Ulakan | Wisata Pantai |
| S. Besar Syeh Burhanudin | Ulakan | Wisata Pantai |
| S. Tua Syeh Burhanuddin | Ulakan | Wisata Sejarah |
| Mesjid Tapakis | Tapakis | Wisata Sejarah |
| Pantai Tiram | Tapakis | Wisata Alam |
| Makam Tuanku Nan Basaruang | Ulakan | Wisata Sejarah |
| Surau Pondok | Ulakan | Wisata Sejarah |
| Makam Sibohong | Ulakan | Wisata Sejarah |
| Pulau Pieh | Ulakan | Wisata Bahari |
| 5. | Nan Sabaris | Pantai Sunur | Sunur | Wisata Pantai |
| Ikan Larangan | Pauh Kambar | Wisata Minat Khusus |
| Makam Syeh M. Hatta | Kapalo Koto | Wisata Sejarah |
| Benteng Jepang | Pauh Kambar | Wisata Sejarah |
| Makam Syeh A. Rahman | Pauh Kambar | Wisata Sejarah |
| Surau Bintungan Tinggi | Bintungan Tinggi | Wisata Sejarah |
| Benteng Belanda | Pauh Kambar | Wisata Sejarah |
| 6. | 2 x 11 Enam Lingkung | Ikan Gadang | Sicincin | Wisata Minat Khusus |
| Terowongan Jepang | Sicincin | Wisata Sejarah |
| Surau Atap Ijuk | Sicincin | Wisata Sejarah |
| Panorama Puncak Kiambang | Parit Malintang | Wisata Alam |
| 7. | Enam Lingkung | Masjid Pakandangan | Pakandangan | Wisata Sejarah |
| Makam Gujarad | Gadur | Wisata Sejarah |
| Makam Syeh Mato Aia | Pakandangan | Wisata Sejarah |
| 8. | 2 x 11 Kayu Tanam | Kawasan Wisata Anai | Kayu Tanam | Wisata Alam |
| Bumi Perkemahan | Asam Pulau | Wisata Minat Khusus |
| Air Terjun Batang Piaman | Kayu Tanam | Wisata Alam |
| Air Terjun Ngungun | Anduriang | Wisata Alam |
| Pemandian Tirta Alami | Kandang IV | Wisata Alam |
| Malibo Anai | Guguk | Wisata Alam |
| Lubuk Bonta | Tarok | Wisata Alam |
| Bumi Perkemahan | Sipisang | Wisata Minat Khusus |
| 9. | VII Koto Sungai Sariak | Panorama Bukik Selasiah | Sei. Ibuh | Wisata Alam |
| Mesjid Tua VII Koto | Sungai Sariak | Wisata Sejarah |
| Gobah Tuangku Salih | Sungai Sariak | Wisata Sejarah |
| Mesjid Tua Barangan | Lurah Ampalu | Wisata Sejarah |
| Gelanggang Pacu Kuda | Paguh Duku | Wisata Minat Khusus |
| Agro Wisata Lebah Madu | Lurah Ampalu | Wisata Minat Khusus |
| 10. | Patamuan | Mangun Indah | Paraman Talang | Wisata Alam |
| Panorama Gunung Tigo | Lareh NanPanjang | Wisata Alam |
| 11. | Padang Sago | Makam Tuanku Saliah | Koto Dalam | Wisata Sejarah |
| 12. | V Koto Kp Dalam | Pantai Pasar Baru | Cimpago | Wisata Pantai |
| Air Terjun Langkuik | Koto Hilalang | Wisata Air Terjun |
| 13. | V Koto Timur | Mesjid Tua Batang Piaman | Padang Alai | Wisata Sejarah |
| Laga-laga Batang Piaman | Batang Piaman | Wisata Budaya |
| Mesjid Tua Limau Purut | Limau Purut | Wisata Sejarah |
| Makam Tuanku Johor | Limau Purut | Wisata Sejarah |
| 14. | Sungai Limau | Pantai Arta Indah | Sungai Paku | Wisata Pantai |
| Benteng Jepang | Kuranji Hilir | Wisata Sejarah |
| Pantai Arta Permai | Sungai Paku | Wisata Pantai |
| Pantai Baselona | Sungai Limau | Wisata Pantai |
| 15. | Batang Gasan | Pantai Aru Gasan | Gasan Gadang | Wisata Pantai |
| 16. | Sungai Geringging | Bukik Siriah | Ladang Rimbo | Wisata Alam |
| Makam Syeh Tangek Talang | Kuranji Hilir | Wisata Sejarah |
| Makam Tuanku Badinah | Sungai Geringging | Wisata Sejarah |
| 17. | IV Koto Aur Malintang | Bukik Bulek | Batu Basa | Wisata Alam |
| Ikan Larangan | Aur Malintang | Wisata Minat Khusus |
| Lesung Keramat | Batu Basa | Wisata Sejarah |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

* + - * 1. Kawasan peternakan, Rencana pengembangan sektoral dalam bentuk penetapan "Kawasan Agropolitan" pengembangan ternak besar dengan komoditi utama ternak sapi. Program ini menuntut konsep pengembangan sentra agrobisnis terpadu dengan pusat kawasan (beberapa kecamatan) sebagai penyangga. Usaha pengembangan untuk kawasan peternakan sedang dilakukan. Salah satunya bahwa dalam waktu dekat sedang dibangun kawasan usaha penggemukan dan pengolahan daging sapi di daerah Lubuk Bonta Kec. 2x11 Kayu Tanam. Secara lebih rinci rencana pengembangan ternak di Kabupaten Padang Pariaman tersaji pada Tabel 2.4 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Jenis Pengembangan Komoditi Peternakan**

**di Kabupaten Padang Pariaman**

| **No.** | **Jenis Komoditi** | **Kecamatan** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sapi Potong | 1.     VII Koto Sungai Sariak | Kawasan Peternakan Prioritas |
| 2.     Padang Sago |
| 3.     Patamuan |
| 4.     Enam Lingkung |
| 5.     Sungai Geringging |
| 6.     IV Koto Aur Malintang |
| 2. | Kerbau | 1.     Sungai Limau |  |
| 1. Batang Gasan |
| 3.     Ulakan Tapakis |
| 3. | Kambing dan Domba | 1.     Ulakan Tapakis |  |
| 2.     Nan Sabaris |
| 3.     Enam Lingkung |
| 4. | Ayam Petelur | 1.     Nan Sabaris |  |
| 2.     Ulakan Tapakis |
| 3.     Enam Lingkung |
| 5. | Ayam Pedaging | 1.     Kayu tanam |  |
| 2.     Lubuk Alung |
| 3.     Sintoga |
| 4.     Batang Anai |
| 6. | Ayam Buras | 1.     V Koto Kampung Dalam |  |
| 2.     Enam Lingkung |
| 3.     Nan Sabaris |
| 7. | Itik | 1.     Nan Sabaris |  |
| 2.     2 X11 Enam Lingkung |
| 3.     Lubuk Alung |
| 8. | Kawasan Integrasi (Kambing dan Coklat, Sapi dan Coklat) | 1.     V Koto Kampung Dalam | Kawasan Integrasi |
| 2.     Enam Lingkung |
| 3.     VII Koto Sungai Sariak |
| 4.     Patamuan |
| 5.     Padang sago |
| 6.     Sungai Geringging |
| 7.     Kayu Tanam |

*Sumber : RTRW Kab. Padang Pariaman Tahun 2010 -2030*

* + - * 1. Kawasan permukiman, Kawasan permukiman dibedakan menjadi kawasan permukiman berciri urban (perkotaan) dan yang berciri rural (perdesaan). Pada umumnya kawasan permukiman berciri urban adalah ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan, dan diluar pusat kegiatan tersebut umumnya merupakan kawasan perdesaan. Baik kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan pada umumnya bertumbuh dengan pola yang relatif sama, yaitu mengikuti perkembangan pembangunan jalan. Pola linier seperti tersebut pada masa mendatang akan menimbulkan persoalan, setidak-tidaknya menyebabkan kemacetan dan kekumuhan. Oleh karena itu untuk pusat-pusat kegiatan dikembangkan pola permukiman yang tidak linier, namun sudah mengarah pada pola grid (papan catur), yang menjamin mengalirnya pergerakan lalu lintas serta terbangunnya pola ruang perkotaan yang lebih berimbang. Secara lengkap, struktur penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 2.5**

**Luas Tanah Menurut Jenis Penggunannya**

**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Penggunaan** | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | |
| **Lahan (ha)** | **(%)** | **Lahan (ha)** | **(%)** | **Lahan (ha)** | **(%)** | **Lahan (ha)** | **(%)** | **Lahan (ha)** | **(%)** |
| 1. | Permukiman | 7.391 | 5,6% | 7.391 | 5,7% | 7.493 | 5,6% | 7.501 | 5,6% | 7.542 | 5,7% |
| 2. | Persawahan ( lahan basah ) | 27.129,00 | 20,4% | 27.129,00 | 18,6% | 27.099,50 | 20,4% | 27.089,50 | 20,4% | 27.082,50 | 20,4% |
| 3. | Tegalan | 644 | 0,5% | 644 | 0,5% | 632,5 | 0,5% | 632,5 | 0,5% | 631,5 | 0,5% |
| 4. | Perkebunan Rakyat | 36.461 | 27,4% | 36.461 | 28,1% | 36.444 | 27,4% | 36.444 | 27,4% | 36.444 | 27,4% |
| 5. | Kebun Campuran | 16.628 | 12,5% | 16.628 | 12,8% | 16.585 | 12,5% | 16.582 | 12,5% | 16.549 | 12,5% |
| 6. | Hutan Belukar | 11.232 | 8,5% | 11.232 | 8,7% | 11.232 | 8,5% | 11.232 | 8,5% | 11.232 | 8,5% |
| 7. | Hutan | 28.644 | 21,6% | 28.644 | 22,1% | 28.644 | 21,6% | 28.644 | 21,6% | 28.644 | 21,6% |
|  | Hutan Sejenis | 75 | 0,1% | 75 | 0,1% | 75 | 0,1% | 75 | 0,1% | 75 | 0,1% |
| 8. | Semak / Alang-Alang | 2.489 | 1,9% | 2.489 | 1,9% | 2.488 | 1,9% | 2.488 | 1,9% | 2.488 | 1,9% |
| 9. | Kolam Tambak Ikan | 56 | 0,0% | 56 | 0,0% | 56 | 0,0% | 56 | 0,0% | 56 | 0,0% |
| 10. | Lain-Lain | 2.130 | 1,6% | 2.130 | 1,7% | 2.130 | 1,6% | 2.135 | 1,6% | 2.135 | 1,6% |
|  | **Jumlah** | **132.879** | **100%** | **132.879** | **100%** | **132.879** | **100%** | **132.879** | **100%** | **132.879** | **100%** |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jelas mempengaruhi pergeseran penggunaan lahan di Kabupaten Padang Pariaman. Sesuatu yang dikhawatirkan di masa yang akan datang adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan produktif dan perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung yang tanpa terkendali. Berbagai kegiatan seperti pembukaan lahan berpindah, kegiatan pertanian, perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan ataupun jasa masih banyak yang belum sesuai dengan konsep lingkungan. Adanya upaya untuk memanfaatkan kawasan lindung menjadi areal budidaya semakin meningkat. Di samping itu juga adanya kecenderungan masyarakat menggunakan sistem ladang berpindah serta pembukaan lahan bagi keperluan pertanian dan kawasan terbangun.

Pada kawasan-kawasan tertentu terlihat kecenderungan perkembangan yang pesat dalam penggunaan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian, ladang berpindah, pembangunan perumahan, jasa dan keperluan kegiatan lainnya. Dimana pada beberapa kecamatan ini yang semula mempunyai kawasan lindung yang cukup signifikan dengan daerah tangkapan air (*catchment area*) Kabupaten Padang Pariaman yang seharusnya dipelihara atau dilestarikan, terlihat sudah mulai berubah fungsi dan dialihkan untuk peruntukan lain seperti untuk kegiatan perladangan dan kegiatan lainnya.

Dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan di Kabupaten Padang Pariaman terdapat berbagai masalah seperti :

1. Terjadinya konversi lahan hutan menjadi lahan permukiman dan kebun
2. Pembangunan yang melanggar sempadan bangunan yang ditetapkan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan lahan yang ditetapkan.
3. Pemanfaatan lahan di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat mengganggu fungsi ekologis DAS tersebut sehingga berdampak terhadap kawasan pemukiman di hilirnya.
4. Batasan kepemilikan lahan yang masih banyak kurang jelas

**2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030, memiliki 4 (empat) strategi kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Agribisnis dan Potensi Kelautan Berbasis Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan.
2. Strategi Pengembangan Kawasan dan Objek Wisata yang Ramah Lingkungan dan Berkesesuaian dengan Budaya Lokal.
3. Strategi Penguatan Konservasi dan Mitigasi Bencana untuk Seluruh Wilayah.
4. Strategi Penciptaan Keseimbangan Pembangunan Wilayah Utara dan Selatan.

Kebijakan ruang dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030 sebagaimana Peraturan Daerah tersebut, dapat dilihat lebih rinci dalam tabel 2.6. di bawah ini:

**Tabel 2.6**

**Arah Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang**

**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 -2030**

| **No** | **Jenis Program** | **Lokasi** | **Ket.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pusat Kegiatan Lokal (PKL ) | Lubuk Alung |  |
| 2. | Pusat Kegiatan Lokal Promosi ( PKLP) | Sungai Geringging |  |
| 3. | Pusat Pelayanan Kawasan ( PPK ) | Sungai Limau |  |
| Sungai Sarik |  |
| Parit Malintang |  |
| Pasar Usang |  |
| 4. | Pusat Pelayanan Lingkung ( PPL ) | Sintuk |  |
| Ulakan |  |
| Pauh Kambar |  |
| Sicincin |  |
| Kayu Tanam |  |
| Tandikek |  |
| Padang Sago |  |
| Kampung Dalam |  |
| Kudu Ganting |  |
| Gasan Gadang |  |
| Batu Basa |  |
| Pakandangan |  |

*Sumber : RTRW Kab. Padang Pariaman Tahun 2010 -2030*

Dari program penataan ruang Kab. Padang Pariaman sesuai dengan Perda No.05 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Padang Pariaman Tahun 2010-2030 maka rencana kerja dijabarkan sebagai berikut :

1. Perwujudan PKL Lubuk Alung dilakukan melalui :
2. Penyusunan RDTR Kawasan per Kabupaten Lubuk Alung;
3. Peningkatan kapasitas jalan nasional ( arteri, primer, koridor timur);
4. Pembangunan jalan lingkar (express way);
5. Pembangunan terminal C;
6. Penataan dan revitalisasi perdagangan;
7. Pembangunan rumah sakit madya;
8. Peningkatan kapasitas PDAM.
9. Perwujudan PKLP Sungai Geringging dilakukan melalui :
10. Penyusunan masterplan agropolis;
11. Pembangunan fasilitas/utilitas utama agropolis;
12. Pembangunan jalan lingkar;
13. Peningkatan kapasitas jalan lokal sekunder (koridor barat)
14. Perwujudan PPK Sungai Sarik dilakukan melalui :
15. Penyusunan masterplan agropolis;
16. Pembangunan fasilitas/utilitas utama agropolis;
17. Pembangunan jalan lingkar;
18. Pembangunan jalan produksi;
19. Pembangunan infrastruktur pemeliharaan ternak besar.
20. Perwujudan PPK Sicincin dilakukan melalui :
21. Pembangunan dan pengembangan pusat kantor pemerintahan;
22. Pembangunan fasilitas perdagangan hasil bumi;
23. Peningkatan kapasitas jalan nasional;
24. Pembangunan jalan lingkar (express way);
25. Pembangunan sport center;
26. Pembangunan balai benih ikan regional;
27. Peningkatan dan pelayanan PDAM;
28. Pengembangan PLTMH
29. Perwujudan PPK Pasar Usang dilakukan melalui :
30. Pembangunan Padang Industrial Park (PIP) pada kawasan ekonomi khusus;
31. Pembangunan embarkasi haji;
32. Pembangunan gerbang bandara kataping;
33. Pembangunan PPI Khusus (marina real estate,kuliner court, playground)
34. Peningkatan jalan nasional arteri primer;
35. Peningkatan dan pelayanan PDAM.
36. Perwujudan PPK Sungai Limau dilakukan melalui :
37. Revitalisasi dan pengembangan fasilitas perdagangan;
38. Pembangunan PPI;
39. Pembangunan industri pengolahan hasil laut;
40. Pembangunan fasilitas penunjang KKLD;
41. Pembangunan fasilitas penunjang pariwisata pantai Arta;
42. Peningkatan kapasitas jalan nasional kolektor primer;
43. Penguatan fungsi PDAM;
44. Pengembangan PLTMH;
45. Pembangunan perangkat keras dan lunak mitigasi gempa (earling warning system, jalur evakuasi/escape roas dan bangunan penyelamat).
46. Perwujudan PPL Sintuk dilakukan melalui :
47. Perbaikan dan pembangunan jalur irigasi;
48. Pembangunan fasilitas penunjang pengolahan hasil pertanian holtikultura;
49. Peningkatan kapasitas jalan nasional kolektor primer;
50. Pembangunan perangkat keras dan lunak mitigasi gempa (earling warning system, jalur evakuasi/escape roas dan bangunan penyelamat).
51. Perwujudan PPL Pauh Kambar dilakukan melalui :
52. Perbaikan dan pembangunan jalur irigasi;
53. Pembangunan fasilitas penunjang pengolahan hasil pertanian holtikultura;
54. Peningkatan kapasitas jalan nasional kolektor primer;
55. Pembangunan perangkat keras dan lunak mitigasi gempa (earling warning system, jalur evakuasi/escape roas dan bangunan penyelamat )
56. Perwujudan PPL Ulakan dilakukan melalui :
57. Revitalisasi pasar tradisonal;
58. Revitalisasi dan pengembangan kawasan wisata tradisonal religius makam Syech Burhanuddin;
59. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi;
60. Peningkatan kapasitas jalan nasional kolektor primer;
61. Pembangunan perangkat keras dan lunak mitigasi gempa (earling warning system, jalur evakuasi/escape roas dan bangunan penyelamat ).
62. Perwujudan PPL Kayu Tanam dilakukan melalui :
63. Peningkatan fasilitas dan utilitas penunjang kawasan wisata Malibou Resort dan sekitarnya;
64. Peningkatan kapasitas jalan nasional kolektor primer;
65. Peningkatan pelayanan perguruan tinggi Kayu Tanam;
66. Pembangunan rest area dan rumah kuliner;
67. Pembangunan rumah holtikultura;
68. Pengembangan PLTMH
69. Perwujudan PPL Pakandangan dilakukan melalui :
70. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi;
71. Pembangunan fasilitas penunjang pengolahan hasil pertanian holtikultura;
72. Peningkatan kapasitas jalan nasional kolektor primer.
73. Perwujudan PPL Tandikek dilakukan melalui :
74. Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi;
75. Pembangunan fasilitas penunjang pengolahan hasil pertanian holtikultura;
76. Pengembangan PLTMH;
77. Pembangunan dan pemantapan jalan alternatif (express way).
78. Perwujudan PPL Padang Sago dilakukan melalui :
79. Perbaikan dan pembangunan jalan produksi perkebunan;
80. Pembangunan fasilitas penunjang pengolahan hasil pertanian holtikultura dan perkebunan.
81. Perwujudan PPL Kampung Dalam dilakukan melalui :
82. Perbaikan dan pembangunan jaringan jalan produksi holtikultura dan perkebunan;
83. Pembangunan fasilitas penunjang pengolahan hasil pertanian holtikultura;
84. Pengembangan PLTMH.
85. Perwujudan PPL Kudu Ganting dilakukan melalui :
86. Perbaikan dan pembangunan jaringan jalan produksi perkebunan dan holtikultura;
87. Pembangunan fasilitas penunjang pengolahan hasil pertanian holtikultura;
88. Peningkatan kapasitas jalan nasional kolektor primer;
89. Pengembangan PLTMH.
90. Perwujudan PPL Gasan Gadang dilakukan melalui :
91. Perbaikan dan pembangunan jaringan rigasi;
92. Pembangunan perangkat keras dan lunak mitigasi gempa (earling warning system, jalur evakuasi/escape roas dan bangunan penyelamat);
93. Pembangunan fasilitas penunjang pengolahan hasil pertanian holtikultura;
94. Peningkatan kapasitas jalan nasional kolektor primer.
95. Perwujudan PPL Batu Basa dilakukan melalui :
96. Pembangunan fasilitas penunjang pengolahan hasil pertanian holtikultura;
97. Peningkatan kapasitas jalan lokal primer;
98. Pengembangan PLTMH

**2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang sering dilanda bencana alam. Bencana alam yang paling sering terjadi meliputi banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gempa bumi. Berdasarkan peta pembagian wilayah rawan bencana, berikut ini dijelaskan pemetaan lokasi rawan bencana yakni :

* + - 1. Kawasan Rawan Tsunami, Kawasan rawan tsunami merupakan wilayah di Kabupaten Padang Pariaman yang berada dipesisir Barat pulau Sumatera (berbatasan langsung dengan Samudera Hindia). Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Batang Anai, Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris, Ulakan Tapakis, Sungai Limau dan Batang Gasan. Potensi gelombang pasang atau tsunami bervariasi dari utara ke selatan, karena bagian selatan lebih landai (pesisir pada Kecamatan batang Anai dan Ulakan Tapakis) sehingga dampak tsunami lebih besar pada kedua kecamatan ini. Klasifikasi zona rawan bencana tsunami :

1. Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
2. Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 - 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
3. Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 - 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.
   * + 1. Kawasan Rawan Banjir, Secara alamiah, banjir pada umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan diatas normal sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistim saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor "bakat" atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Penyebab dari bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dipengaruhi oleh curah hujan cukup tinggi, tipe dan karakter daerah, kondisi daerah tangkapan air sedikit, kurangnya kualitas dan kuantitas drainase dan kurangnya pengelolaan daerah konservasi. Secara umum bencana banjir yang terjadi adalah akibat kondisi drainase yang kurang baik sehingga saat hujan terjadi genangan serta terjadinya kerusakan hutan di hulu sungai yang mengakibatkan erosi dan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu di Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Sintuk Toboh Gadang, Lubuk Alung, Nan Sabaris, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau, Batang Gasan, dan 2x11 Enam Lingkung.

* + - 1. Kawasan Rawan Longsor, Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (debris avalanches) dan nendatan (slumps/rotational slides). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (seepage) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (instability) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain :

1. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api;
2. klim : curah hujan yang tinggi;
3. Keadaan topografi : lereng yang curam;
4. Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika;
5. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis;
6. Gejala umum terjadinya tanah longsor;
7. Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing;
8. Biasanya terjadi setelah hujan;
9. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba;
10. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

Daerah rawan longsor dijumpai di daerah-daerah yang memiliki lereng lebih dari 40% dengan tekstur tanah berpasir, gawir dan patahan. Potensi longsor dapat juga disebabkan oleh lapisan kedap air yang dapat menjadi longsoran. Lokasi daerah yang termasuk sebagai kawasan rawan longsor ini adalah: Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

* + - 1. Kawasan Rawan Liquifaksi. Rawan Liquifaksi atau rawan mengalami pelulukan tanah bila terjadi gempa pada skala diatas 7,2 skala Ritcher. Ciri khas kawasan liquifaksi ini adalah akibat yang ditimbulkannya berupa penurunan bangunan atau seakan-akan bangunan masuk ke dalam tanah. Untuk Padang Pariaman kawasan rawan liquifaksi tersebar pada Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, Lubuk Alung, Nan Sabaris, VII Koto Sei Sariak, Sungai Limau, Batang Gasan.
      2. Kawasan Rawan Gempa. Pada dasarnya seluruh wilayah Padang Pariaman adalah kawasan rawan gempa. Daya rusak gempa umumnya semakin tinggi bila mengenai wilayah yang jenuh air (liquifaksi) dan pada jalur sesar (patahan) serta pertemuan antar sesar yang belum mengalami patahan (rekahan). Jalur sesar di Kabupaten Padang Pariaman melintasi bagian selatan-barat Kecamatan Batang Gasan dan Sungai Limau, bagian tengah kecamatan V Koto Dalam, V Koto Timur, Padang Sago, 2x11 Enam Lingkung dan 2x11 Kayu Tanam. Terdapat 3 patahan yang saling melintang utara-selatan dan barat-timur di Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung serta memanjang disisi pantai di kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris. Sementara itu areal yang diperkirakan lebih rawan dari jalur sesar adalah area pertemuan antar sesar yang belum rekah. Areal ini terdapat di Sungai Limau, VII Koto Sungai Sariak, Nan Sabaris, Lubuk Alung dan Batang Anai. Jalur dan area patahan ini akan menjadi limitasi dalam pembangunan permukiman.
      3. Kawasan Bencana Vulkanisme, Letusan gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik adalah sebagai berikut :
  1. Awan Panas, merupakan campuran material letusan antara gas dan bebatuan (segala ukuran) terdorong ke bawah akibat densitas yang tinggi dan merupakan adonan yang jenuh menggulung secara turbulensi bagaikan gunung awan yang menyusuri lereng. Selain suhunya sangat tinggi, antara 300 - 700° Celcius, kecepatan lumpurnyapun sangat tinggi > 70 km/jam (tergantung kemiringan lereng).
  2. Lontaran Material (pijar),terjadi ketika letusan (magmatik) berlangsung. Jauh lontarannya sangat tergantung dari besarnya energi letusan, bisa mencapai ratusan meter jauhnya. Selain suhunya tinggi (>200°C), ukuran materialnya pun besar dengan diameter > 10 cm sehingga mampu membakar sekaligus melukai, bahkan mematikan mahluk hidup. Lazim juga disebut sebagai "bom vulkanik".
  3. Hujan Abu lebat, terjadi ketika letusan gunung api sedang berlangsung. Material yang berukuran halus (abu dan pasir halus) yang diterbangkan angin dan jatuh sebagai hujan abu dan arahnya tergantung dari arah angin. Karena ukurannya yang halus, material ini akan sangat berbahaya bagi pernafasan, mata, pencemaran air tanah, pengrusakan tumbuh tumbuhan dan mengandung unsur-unsur kimia yang bersifat asam sehingga mampu mengakibatkan korosi terhadap seng dan mesin pesawat.
  4. Lava, merupakan magma yang mencapai permukaan, sifatnya liquid (cairan kental dan bersuhu tinggi, antara 700 -1200°C. Karena cair, maka lava umumnya mengalir mengikuti lereng dan membakar apa saja yang dilaluinya. Bila lava sudah dingin, maka wujudnya menjadi batu (batuan beku) dan daerah yang dilaluinya akan menjadi ladang batu. Gas Racun, muncul tidak selalu didahului oleh letusan gunung api sebab gas ini dapat keluar melalui rongga-rongga ataupun rekahan-rekahan yang terdapat di daerah gunung api. Gas utama yang biasanya muncul adalah CO2, H2S,HCl, SO2, dan CO.

Kawasan yang rawan terhadap bahaya vulkanik yang berasal dari Gunung Singgalang meliputi Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Patamuan dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

* + - 1. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung. Berdasarkan letak geografis, pada umumnya wilayah Kabupaten Padang Pariaman rentan mengalami bencana angin puting beliung. Bencana ini mengakibatkan terjadinya kerugian yang cukup besar terhadap masyarakat. Ada beberapa kejadian diantaranya terangkatnya atap rumah, rumah tertimpa pohon dan kerusakan disepanjang pantai akibat terpaan ombak disaat badai.

**2.1.4 Demografi**

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 adalah 406.076 jiwa yang terdiri dari 199.808 laki-laki dan 206.268 perempuan. Hal ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 403.530 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 198.315 jiwa laki-laki dan 205.215 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Batang Anai yaitu sebanyak 46.424 jiwa dan jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan Padang Sago yaitu sebanyak 8.243 jiwa. Sedangkan untuk kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 ini sebesar 306 jiwa/km2 dengan laju pertumbuhan penduduk pada rentang tahun 2014-2015 adalah 0,63 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.7. di bawah ini :

**Tabel 2.7**

**Jumlah Penduduk di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Luas wilayah** | **Jumlah Penduduk**  **(Jiwa)** | **Kepadatan Penduduk**  **(Jiwa/Km2)** |
| 2011 | 1,328.79 | 395.420 | 298 |
| 2012 | 1,328.79 | 398.223 | 300 |
| 2013 | 1,328.79 | 400.890 | 302 |
| 2014 | 1,328.79 | 403.530 | 304 |
| 2015 | 1,328.79 | 406.076 | 306 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dengan adanya pertambahan penduduk ini, maka banyaknya pendaftaran penduduk juga semakin bertambah. Pada tahun 2015 tercatat pendafataran tenagakerja menurut jenis kelamin sebesar 2.899 jiwa yang terdiri dari 1.028 jiwa laki-laki dan 1.871 jiwa perempuan. Sedangka jumlah orang yang bekerja di tahun 2015 adalah sebanyak 157.973 jiwa orang dengan rincian 98.472 jiwa laki-laki dan 59.501 perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, pekerja di Kabupaten Padang Pariaman pada tingkatan Sekolah Dasar sebanyak 37.349 orang, SLTP sebanyak 29.748 orang, SLTA sebanyak 37.054 orang, dan pekerja yang berpendidikan di atas Sekolah Menengah Atas (Diploma s.d Universitas) hanya sebanyak 13.134 orang.

Jika dilihat dari struktur usia penduduk Kabupaten Padang Pariaman, yang tergolong menonjol adalah usia pendidikan tinggi (20-24 tahun) atau awal usia kerja, artinya jumlah masyarakat usia produktif relatif besar yang merupakan modal dasar bagi pembangunan. Jumlah balita yang awalnya menurun, dalam sepuluh tahun terakhir cenderung meningkat. Artinya penduduk yang akan mendapat pendidikan dasar dan menengah dalam 5-10 tahun mendatang akan meningkat sehingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah harus dipersiapkan. Selanjutnya, perkembangan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel 2.8. berikut ini :

**Tabel 2.8**

**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja**

**Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Pada Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAHUN** | **TINGKAT PENDIDIKAN** | | | | |
| **SD** | **SLTP** | **SLTA** | **DIPLOMA** | **UNIVERSITAS** |
| 2011 | 48.880 | 27.864 | 31.207 | 5.237 | 6.009 |
| 2012 | 34.255 | 33.312 | 40.947 | 3.755 | 8.592 |
| 2013 | 28.473 | 34.249 | 40.651 | 4.320 | 9.118 |
| 2014 | 30.067 | 40.552 | 38.677 | 1.535 | 9.475 |
| 2015 | 37.349 | 29.748 | 37.054 | 3.362 | 9.772 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 menunjukan kecendrungan yang positif dimana untuk pengangguran terbuka laki-laki sebesar 5,39 persen dan perempuan 6,48 persen. Namun sebaliknya, untuk tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kecendrungan yang negatif, karena semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 77,66 persen dan perempuan sebesar 44,20 persen. Untuk lebih jelasnya perkembangan tingkat tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini :

**Tabel 2.9**

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

**dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Laki-Laki**  **(%)** | **Perempuan (%)** | **Laki-Laki**  **(%)** | **Perempuan**  **(%)** |
| 2011 | 83,00 | 47,00 | 9,00 | 10,00 |
| 2012 | 81,00 | 47,00 | 8,00 | 7,00 |
| 2013 | 82,53 | 41,71 | 7,81 | 6,52 |
| 2014 | 82,80 | 48,71 | 7,86 | 7,80 |
| 2015 | 77,66 | 44,20 | 5,39 | 6,48 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

* 1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangan penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan seni budya dan olah raga.

**2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diwujudkan dalam :

* + - 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menggambarkan kemmpuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menuut kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku maupun harga konstans setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk PDRB atas harga berlaku pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 1.879.833,3 juta rupiah dari Rp. 12.272.885,4 juta rupiah pata tahun 2013 menjadi Rp. 14.152.718, 7 juta rupiah pada tahun 2014. Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini belum dapat mencerminkan perbaikan produktivitas ekonomi secara riil, karena kenaikan ini masih mengandung unsur inflasi.

Begitupun dengan PDRB atas harga konstans yang dapat menggambarkan produktivitas ekonomi secara riil juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 640.083 juta rupiah dari tahun 2013. Pada tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga konstans tersebut hanya 10.444.417,7 juta rupiah dan pada tahun 2014 menjadi 11.084.500,7 juta rupiah. Kenaikan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tersebut didukung berbagai sektor dalam perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, namun sektor yang dominan adalah sektor Pertanian dan sektor Angkutan dan Komunikasi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor pertanian yang mencapai Rp. 3.263.103,8 juta rupiah dan sektor transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 4.793.054,3 juta rupiah pada tahun 2015.

Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstans ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan 2.3 berikut ini :

**Gambar 2.2**

**Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku**

**Tahun 2011-2015**

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

**Gambar 2.3**

**Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan**

**Tahun 2011-2015**

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dari perkembangan PDRB Atas Harga Konstans yang tergambar pada gambar 2.3 di atas, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tergambar pada gambar 2.4 di bawah ini :

**Gambar 2.4**

**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Selanjutnya perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstans ini secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.10 dan 2.11 berikut ini :

**Tabel 2.10**

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Lapangan Usaha**

**Tahun 2011-2015**

| **No** | **Lapangan Usaha** | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** | **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** | **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** | **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** | **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 2.178.232,30 | 2.028.368,60 | 2.351.018,10 | 2.082.864,00 | 2.595.668,90 | 2.162.920,60 | 2.985.060,10 | 2.311.660,80 | 3.263.103,80 | 2.417.658,90 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 555.571,00 | 518.878,90 | 618.063,90 | 541.217,20 | 718.529,60 | 578.891,50 | 885.625,90 | 613.225,70 | 1.004.401,00 | 653.664,40 |
| 3 | Industri pengolahan | 1.282.926,00 | 1.198.762,50 | 1.413.781,30 | 1.277.752,10 | 1.569.313,30 | 1.375.718,90 | 1.708.078,70 | 1.452.095,40 | 1.768.893,00 | 1.501.073,90 |
| 4 | Pengadaan listrik dan gas | 2.329,00 | 2.387,80 | 2.422,00 | 2.685,70 | 2.373,60 | 2.717,50 | 2.953,70 | 2.987,70 | 3.955,40 | 3.029,90 |
| 5 | Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 4.782,30 | 4.846,80 | 4.877,90 | 4.920,40 | 5.267,20 | 5.152,90 | 5.671,00 | 5.377,30 | 6.467,30 | 5.657,40 |
| 6 | Konstruksi ' | 700.998,30 | 649.586,80 | 803.751,90 | 703.577,20 | 939.257,90 | 782.164,80 | 1.094.073,20 | 843.961,20 | 1.212.881,00 | 888.806,60 |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor | 897.086,10 | 836.659,70 | 982.128,70 | 889.179,50 | 1.064.113,10 | 951.004,80 | 1.191.533,70 | 1.029.652,30 | 1.322.013,00 | 1.084.803,00 |
| 8 | transportasi dan pergudangan | 2.165.447,90 | 1.954.885,20 | 2.604.260,10 | 2.103.347,80 | 3.281.447,50 | 2.184.855,10 | 3.965.014,70 | 2.269.453,70 | 4.793.054,30 | 2.492.704,90 |
| 9 | Penyediaan akomodasi dan makan minum | 77.292,60 | 70.734,00 | 85.793,50 | 73.759,90 | 96.036,10 | 77.111,50 | 112.573,00 | 82.158,60 | 129.134,30 | 87.755,00 |
| 10 | Informasi dan komunikasi | 287.501,40 | 281.567,90 | 324.973,20 | 314.354,60 | 348.686,60 | 349.413,20 | 389.148,70 | 383.064,00 | 390.497,00 | 419.396,60 |
| 11 | Jasa keuangan dan Asuransi | 141.917,50 | 136.149,30 | 163.715,50 | 149.285,60 | 182.754,20 | 159.344,40 | 203.842,40 | 169.086,20 | 223.160,30 | 175.550,60 |
| 12 | Real Estat | 96.831,00 | 93.040,40 | 103.313,00 | 96.863,30 | 115.825,40 | 102.361,30 | 132.464,50 | 108.204,80 | 146.780,50 | 113.350,90 |
| 13 | Jasa perusahaan | 7.081,20 | 6.974,40 | 7.926,00 | 7.548,60 | 8.906,20 | 8.188,50 | 9.918,30 | 8.697,10 | 11.229,40 | 9.346,20 |
| 14 | Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib | 493.402,90 | 466.457,70 | 547.507,20 | 478.404,80 | 618.048,50 | 520.161,00 | 653.425,90 | 533.095,60 | 653.848,90 | 557.291,60 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 385.449,00 | 357.464,70 | 446.378,50 | 389.074,80 | 520.348,70 | 419.248,80 | 576.798,60 | 448.119,30 | 653.244,80 | 479.532,60 |
| 16 | jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 49.854,30 | 46.548,50 | 60.258,70 | 51.459,90 | 68.690,60 | 55.495,70 | 75.433,60 | 60.191,10 | 80.095,20 | 64.090,60 |
| 17 | jasa lainnya | 107.348,40 | 100.621,40 | 119.221,40 | 107.461,10 | 144.617,90 | 114.019,10 | 161.102,70 | 123.306,50 | 175.678,40 | 130.702,40 |
|  | Total PDRB | 9.434.051,20 | 8.753.934,60 | 10.639.390,90 | 9.273.756,50 | 12.279.885,30 | 9.848.769,60 | 14.152.718,70 | 10.444.337,30 | 15.838.437,60 | 11.084.415,50 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

**Tabel 2.11**

**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstans Menurut Penggunaannya**

**Tahun 2011-2015**

| **No** | **Lapangan Usaha** | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** | **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** | **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** | **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** | **Atas Harga Belaku** | **Atas Harga Konstans** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 23,09 | 23,17 | 22,10 | 22,46 | 21,15 | 21,96 | 21,09 | 22,13 | 20,63 | 21,81 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 5,89 | 5,93 | 5,81 | 5,84 | 5,85 | 5,88 | 6,26 | 5,87 | 6,35 | 5,90 |
| 3 | Industri pengolahan | 13,60 | 13,69 | 13,29 | 13,78 | 12,76 | 13,97 | 12,07 | 13,90 | 11,18 | 13,54 |
| 4 | Pengadaan listrik dan gas | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
| 6 | Konstruksi ' | 7,43 | 7,42 | 7,55 | 7,59 | 7,65 | 7,94 | 7,73 | 8,08 | 7,67 | 8,02 |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran; reparasai mobil dan sepeda motor | 9,51 | 9,56 | 9,23 | 9,59 | 8,67 | 9,66 | 8,42 | 9,86 | 8,36 | 9,79 |
| 8 | transportasi dan pergudangan | 22,95 | 22,33 | 24,48 | 22,68 | 26,74 | 22,18 | 28,02 | 21,73 | 30,30 | 22,49 |
| 9 | Penyediaan akomodasi dan makan minum | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,79 |
| 10 | Informasi dan komunikasi | 3,05 | 3,22 | 3,05 | 3,39 | 2,84 | 3,55 | 2,75 | 3,67 | 2,47 | 3,78 |
| 11 | Jasa keuangan dan Asuransi | 1,50 | 1,56 | 1,54 | 1,61 | 1,49 | 1,62 | 1,44 | 1,62 | 1,41 | 1,58 |
| 12 | Real Estat | 1,03 | 1,06 | 0,97 | 1,04 | 0,94 | 1,04 | 0,94 | 1,04 | 0,93 | 1,02 |
| 13 | Jasa perusahaan | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| 14 | Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib | 5,23 | 5,33 | 5,15 | 5,16 | 5,04 | 5,28 | 4,62 | 5,10 | 4,13 | 5,03 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 4,09 | 4,08 | 4,20 | 4,20 | 4,24 | 4,26 | 4,08 | 4,29 | 4,02 | 4,33 |
| 16 | jasa kesehatan dan kegiatan sosial | 0,53 | 0,53 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,53 | 0,58 | 0,51 | 0,58 |
| 17 | jasa lainnya | 1,14 | 1,15 | 1,12 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,14 | 1,18 | 1,11 | 1,18 |
|  | Total PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Distribusi kegiatan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten padang Pariaman menunjukan adanya persebaran yang relatif merata.

* + - 1. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sangat dipengaruhi dan bergantung pada kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.12 di bawah ini.

**Tabel 2.12**

**Laju Inflasi Year on Years di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Inflasi Nasional | 3,79 | 4,30 | 8,38 | 8,36 | 8,36 |
| Inflasi Provinsi Sumatera Barat | 5,37 | 4,16 | 10,87 | 11,90 | 1,08\* |
| Inflasi Kota Padang | 5,37 | 4,18 | 10,87 | 11,90 | 5,93 |
| Inflasi Kab. Padang Pariaman | 5,37 | 4,18 | 10,87 | 11,90 | 5,93 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016, RPJMD Propinsi Tahun 2016-2021*

Laju inflasi di Kabupaten Padang Pariaman secara spasial cenderung mengikuti laju inflasi Kota Padang, karena sebagai kabupaten penyangga ibukota provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, inflasi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di tingkat Provinsi.

* + - 1. PDRB Perkapita

Secara konsep, PDRB perkapita diartikan sebagai Nilai PDRB atas dasar harga pasar dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk. Selama kurun waktu 2010-2015 PDRB perkapita Padang Pariaman selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita yang cenderung mengalami peningkatan menyiaratkan pertumbuhan penduduk terutama migrasi dari luar daerah lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB per kapita ini akan semakin meningkat apabila terciptanya perluasan kesempatan kegiatan ekonomi untuk mendukung pertambahan angkatan kerja baru, sekaligus mengembangkan kerja sama dengan pihak investor dari luar. PDRB per kapita Kabupaten Padang Pariaman tersebut, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut ini :

**Tabel 2.13**

**Nilai PDRB Per Kapita di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lapangan Usaha** | **Satuan** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| PDRB per Kapita Nasional | Juta Rupiah | 33,5 | 36,5 | 36,5 | 41,81 | 45,18 |
| PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku | Juta Rupiah | 9.434.051,2 | 10.639.390,9 | 12.279.885,3 | 14.152.718,7 | 15.838.437,6 |
| Jumlah penduduk | Jiwa | 395.420 | 398.223 | 400.890 | 403.530 | 406.076 |
| PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 23,86 | 26,72 | 30,63 | 35,07 | 39,00 |

*Sumber : Data Olahan Bappeda Kab. Padang Pariaman, 2016*

Dalam hal meningkatkan pndapatan per kapita penduduk Kabupaten Padang Pariaman dapat dilakukan dengan : Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi pemanfaatan teknologi, optimalisasi program keluarga berencana dan perluasan lapangan pekerjaan.

* + - 1. Indeks Gini

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini *(Gini Ratio)*. Koefiasian Gini di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2011-2015 sebagaimana yang ditunjukan pada tabel 2.8 di bawah ini relatif fluktuatif. Hal ini ditunjukan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2011-2015 semakin besar meskipun masih dalam kategori ketimpangan rendah.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004). Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

- GR < 0.4 : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah

- 0.4 < GR < 0.5 : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

- GR > 0.5 : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Gini rasio Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 sebesar 0,33 sedangkan pada Tahun 2011 naik menjadi 0,35. Kenaikan juga terjadi pada Tahun 2012 menjadi sebesar 0,35 dan pada tahun 2014 menjadi 0,36 sekalipun selama empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan, tetapi Kabupaten Padang Pariaman termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah (BPS Kabupaten Padang Pariaman). Indikator Makro Ekonomi yang ditunjukkan melalui Gini Ratio di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.14 di bawah ini :

**Tabel 2.14**

**Indikator Makro Ekonomi yang ditunjukkan melalui Gini Ratio**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Indek Gini Ratio | **0,33** | **0,35** | **0,36** | **0,363** | **0,363\*\*** | **0,363\*\*\*** |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Salah satu upaya pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin melalui berbagai program antara lain PPMK, pengembangan UMKM, dan peningkatan peran koperasi serta upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

* + - 1. Persentase penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Secara makro, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran per bulan perkapita. Metode penghitungan penduduk miskin melalui metode ini dilakukan dengan menghitung komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Untuk lebih jelasnya perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini :

**Gambar 2.5**

**Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)**

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Selanjutnya, untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini :

**Gambar 2.6**

**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dari gambar 2.6 di atas, dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten padang Pariaman selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin berjumlah 8,43 persen sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan berjumlah 91,57 persen. Namun walaupun demikian, penduduk miskin masih rentan terhadap perubahan harga terutama kebutuhan pokok, biaya angkutan dan biaya kesehatan dan sebagian besar penduduk miskin tersebut berusaha di sektor informal dan rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar.

* + - 1. Angka Kriminalitas Tertangani

Letak Kabupaten Padang Pariaman yang strategis, disamping daerah penyangga ibukota provinsi Sumatera Barat, juga perlintasan terhadap mobilitas dari kabupaten/kota lainnya. Oleh sebab itu, Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan pada masalah kerentanan akan kriminalitas. Data statistik menunjukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, masih bersifat fluktuatif. Berikut adalah rincian kriminalitas dan gangguan baik dari jumlah kasus maupun yang tertangani pada tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman.

**Gambar 2.7**

**Angka Kriminalitas dan Gangguan di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

*Sumber : Data Olahan Bappeda Kab. Padang Pariaman, 2016*

Dari data olahan di atas, dapat digambarkan persentase penyelesaian tindak pidana dan gangguan di Kabupaten Padang Pariaman pada gambar 2.18 di bawah ini :

**Gambar 2.8**

**Persentase Penyelesaian Tindak Pidana dan Gangguan**

**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015**

*Sumber : Data Olahan Bappeda Kab. Padang Pariaman, 2016*

**2.2.2. Kesejahteraan Sosial**

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangan harus berorientasi kepada masyarakatnya, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah. Mulai tahun 2014, IPM dihitung menggunakan metode yang baru, mengikuti rekomendasi dari *United Nations Development Programme (UNDP).* Perubahan metode tersebut adalah pada penggunaan variabel rata-rata lema sekolah serta rata-rata indeksnya dihitung dengan rata-rata geometrik.

Perkembangan indeks pembangunan manusia dari tahun 2011 -2015 dapat dilihat pada tabel 2.15 di bawah ini :

**Tabel 2.15**

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I P M** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Kabupaten Padang Pariaman | 65,89 | 66,2 | 67,15 | 67,56 | 68,04 |
| Provinsi Sumatera Barat | 67,81 | 68,36 | 68,91 | 69,36 | 69,98 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Data BPS di atas, menunjukan bahwa nilai IPM di Kabupaten Padang Pariaman di bawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan posisi IPM di Kabupaten Padang Pariaman, memang diperlukan terobosan dan kerja keras secara simultan dan terus menerus terutama pada pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, karena variabel utama dalam penghitungan IPM sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan kualitas manusia dari segi pendidikan dan kesehatan dan ditunjang dengan pendapatan per kapita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Memperpanjang angka harapan hidup, meningkatkan angka melek huruf, memperpanjang angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan pendapatan perkapita.

Data BPS di atas, menunjukan bahwa nilai IPM di Kabupaten Padang Pariaman di bawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan posisi IPM di Kabupaten Padang Pariaman, memang diperlukan terobosan dan kerja keras secara simultan dan terus menerus terutama pada pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, karena variabel utama dalam penghitungan IPM sangat ditentukan oleh keberhasilan peningkatan kualitas manusia dari segi pendidikan dan kesehatan dan ditunjang dengan pendapatan per kapita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Memperpanjang angka harapan hidup, meningkatkan angka melek huruf, memperpanjang angka rata-rata lama sekolah dan meningkatkan pendapatan perkapita.

1. Angka Melek Huruf

**Tabel 2.16**

**Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Kabupaten Padang Pariaman | 94,51 | 94,53 | 94,86 | 98,99 | 93 |
| Provinsi Sumatera Barat | 97,16 | 97,16 | 97,38 | . 97,34 |  |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Angka melek huruf (AMH) Kabupaten Padang Pariamanterus menunjukan perbaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2015, yaitu 93 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat padang pariaman berusia 15 tahun keatas yang masih belum bisa tulis baca adalah sebanyak 7% pada tahun 2015.

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2014 Angka melek huruf (AMH) Kabupaten Padang Pariaman terus menujukan perbaikan dari Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Perkembangan yang relatif baik untuk angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini.

**Tabel 2.17**

**Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten** | **2011 (tahun)** | **2012 (tahun)** | **2013 (tahun)** | **2014 (tahun)** | **2015 (tahun)** |
| Kabupaten Padang Pariaman | 6,68 | 6,77 | 6,86 | 6,88 | 6,89 |
| Provinsi Sumatera Barat | 8,20 | 8,27 | 8,28 | 8,29 | 8,42 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dari tabel 2.17 di atas dapat dijelaskan bahwa, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2011-2015, rata-rata lama sekolah berada di 6,8 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa di program belajar 9 tahun akan masih dioptimalkan.

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Padang Pariaman secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.18 di bawah ini.

**Tabel 2.18**

**Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten** | **2011 (tahun)** | **2012 (tahun)** | **2013 (tahun)** | **2014 (tahun)** | **2015 (tahun)** |
| Kabupaten Padang Pariaman | 66,96 | 67,07 | 67,18 | 67,24 | 67,64 |
| Provinsi Sumatera Barat | 67,79 | 68,00 | 68,21 | 68,32 | 68,66 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dari tabel 2.22 di atas dapat dijelaskan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dibandingkan dengan angka harapan hidup di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah diatasi lebih baik.

1. Daya Beli Masyarakat

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli masyarakat ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda, semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang rerati semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir daya beli masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data BPS sebagaimana tabel 2.23 di bawah ini :

**Tabel 2.19**

**Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabupaten** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Kabupaten Padang Pariaman | 9.795,34 | 9.865,80 | 9.936,77 | 9.990,33 | 10.260,21 |
| Provinsi Sumatera Barat | 9.408,74 | 9.478,88 | 9.569,54 | 9.620,73 | 9.803,74 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dari tabel 2.19 di atas dapat dilihat bahwa kemapuan daya beli masyarakat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, daya beli masyarakat Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp. 10.260,21 per unit barangnya. Selama tahun 2011-2015, daya beli masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, selalu berada di atas rata-rata daya beli masyarakat di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

* + 1. **Seni Budaya dan Olah Raga**

Pengembangan seni budaya, kepemudaan, dan olahraga menjadi kegiatan yang penting. Salah satu kinerja pengembangan seni dan budaya berdampak terhadap kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2015, terdapat penambahan jumlah objek wisata yang semula pada tahun 2011 berjumlah 70 destinasi wisata menjadi 78 destinasi objek wisata,, terutama wisata alam dari 22 destinasi wisata alam menjadi 25 destinasi wisata alam, sedangkan untuk destinasi wisata budaya, sejarah, pantai, dan minat khusus, relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan terhadap kunjungan jumlah wisatawan di Kabupaten Padang pariaman. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.8 di bawah ini :

**Gambar 2.8**

**Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara**

**di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015**

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan doestik dan mancanegara selalu mengalami peningkatan, namun , jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 dibandingkan dengan tahun 2011-2013. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, karena melalui perbaikan sarana dan prasarana seni dan budaya, diharapkan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara tersebut, mengingat efek domino yang akan dirasakan oleh masyarakat Padang Pariaman terutama untuk masyarakat di sekitar objek wisata.

Selanjutnya untuk olah raga, melalui event-event olahraga bertaraf internasional seperti Tour De Singkarak, diharapkan dapat memicu pergerakan ekonomi masyarakat. Perbaikan sarana dan prasarana terhadp olahraga terus dilakukan.

**2.3. Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik yang berkualitas masih menjadi kendala bagi pomerintah karena berbagai hambatan-hambatan baik dari segi sikap, perilaku dan mentalitas SDM dalam hal ini PNS sebagai aparatur pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan melayani dan bukan untuk dilayani. Sekaligus berupaya mempertahankan dukungan, kepercayaan masyarakat dengan mereformasi wawasan berfikir dan mengevaluasi kinerja sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Upaya-upaya menuju peningkatan kualitas pelayanan tersebut dengan memahami: unsur-unsur dan jenis pelayanan publik, kegiatan pelayanan, penyelenggaraan publik, azas, prinsip, standar pelayanan publik, kualitas dan dimensi pelayanan agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami formulasi aspek-aspek pelayanan publik diharapkan pegawai sebagai aparatur negara dapat meningkatkan produktivitas kerjannya dalam hal pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan publik yang berkualitas

Berdasarkan survei terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015, kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan trend yang meningkat. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman menggunakan 14 (empat belas) indikator kepuasan dalam mengukur 5 (lima) unit layanan terhadap masyarakat yang meliputi Kantor Camat Batang Gasan, Kantor Camat IV Koto Aur Malintang, Kantor Camat Padang Sago, kantor Camat VII Koto Sungai Sarik dan Kantor Camat V Koto Timur. Secara umum hasil dari pengukuran Indeks Kepuaasan Masyarakat terhadap kinerja SKPD tersebut mencerminkan tingkat kualitas dan kinerja pelayanan yang baik dengan mutu pelayanan “B”. Secara lebih terperinci dapat kita lihat pada tabel 2.20. berikut ini :

**Tabel 2.20.**

**Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lima Unit Pelayanan di Kabupaten Padang Pariaman**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Unit Pelayanan** | **Nilai IKM** | **Mutu Pelayanan** | **Kinerja Unit Pelayana** |
| 1 | Kecamatan Batang Gasan | 69,05 | B | Baik |
| 2 | Kecamatan IV Koto Aur Malintang | 72,05 | B | Baik |
| 3 | Kecamatan Padang Sago | 70,17 | B | Baik |
| 4 | Kecamatan VII Koto Sungai Sarik | 73,06 | B | Baik |
| 5 | Kecamatan V Koto Timur | 72,82 | B | Baik |

*Sumber: Hasil Executive Report Bagian Organisasi dan PAN, 2015*

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada urusan konkuren pemerintahan terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 8 urusan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari delapan belas urusan, dan urusan pemerintahan pilihan terdiri sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

* + 1. **Urusan Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kabupaten Padang Pariaman memiliki kewenangan atas pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal. Adapun perkembangan pelayanan urusan Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut ini.

**Tabel 2.21.**

**Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pendidikan**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PENDIDIKAN** |  |  |  |  |  |  |
| **Pendidikan dasar:** |  |  |  |  |  |  |
| Angka partisipasi sekolah | 104.25 | 93.52 | 94.04 | 100.75 | 107.75 | 99,22 |
| Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah | 68.54 | 69.00 | 71.00 | 78.41 | 71.00 | 71.00 |
| Rasio guru/murid | 14.00 | 15.11 | 13.00 | 22.00 | 27.00 | 28.00 |
| Rasio guru/murid per kelas rata-rata | 0.98/63.30 | 0,37/52,55 | 0,51/64,30 | 0.53/65.00 | 0.53/65.00 | 0.59/67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pendidikan menengah:** |  |  |  |  |  |  |
| Angka partisipasi sekolah | 49.30 | 46.33 | 58.72 | 56.36 | 56.40 | 60.00 |
| Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%) | 1.196 | 1.14 | 1.20 | 1.73 | 1.734 | 1.201 |
| Rasio guru terhadap murid | 6 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 21 |
| Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata | 35 | 32 | 30 | 28 | 30 | 24 |
| **Fasilitas Pendidikan:** |  |  |  |  |  |  |
| Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 52.02 | 53.00 | 59.20 | 93.36 | 95.36 | 68.00 |
| Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | 73.72 | 75.00 | 76.52 | 77.83 | 80.83 | 78.00 |
| Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | 77.61 | 78.00 | 86.25 | 93.27 | 95.27 | 92.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):** |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA | 3,206 | 3104 | 3943 | 7228 | 6,165 | 6,720 |
| Angka melek huruf | 94.50 | 94.51 | 94.53 | 94.86 | 98.99 | 93 |
| Angka rata-rata lama sekolah | 7.26 | 7.31 | 7.46 | 7.47 | 7,48 | 8,40 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dari tabel 2.21 diatas dapat dilihat bahwa Angka Melek huruf mengalami fluktuasi dan cederung mengalami penurunan yaitu 93 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat padang pariaman berusia 15 tahun keatas yang masih belum bisa tulis baca adalah sebanyak 7% pada tahun 2015. Untuk Angka rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan setiap tahun yaitu 8.40 hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan rata-rata penduduk Padang pariaman masih setingkat SLTP. Angka partisipasi sekolah cenderung mengalami berfluktuasi dari tahun ketahun, untuk tingkat pendidikan dasar mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 104.25 sedangkan 2015 sebesar 99,22. hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Padang Pariaman pada usia pendidikan dasar rata-rata adalah 99 atau 100 dari 1000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar untuk tingkat pendidikan menengah mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 49,30 sedangkan 2015 sebesar 60. hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Padang Pariaman pada usia pendidikan menengah rata-rata adalah 60 dari 1000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah cenderung masih menempuh pendidikan menengah.

* + - 1. **Angka Partisipasi Sekolah**

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Pendidikan anak tidak hanya tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP, dan SMA, namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun), bahkan batita (bawah tiga tahun). Diyakini bahwa masa balita seorang anak adalah masa keemasan pertumbuhan otaknya. Dimasa keemasan ini akan sangar berpengaruh saat mereka dewasa nantinya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anaksejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada tingkat dasar, APS merupakan jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar 7-12 tahun atau setara SD dan usia 13-15 tahun atau setara SMP yang sedang bersekolah di SD dan SMP per 1.000 jumlah penduduk usia SD dan SMP. Pada pendidikan menengah, APS merupakan jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah, yaitu usia 16-18 tahun atau setara yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Berikut adalah tabel 2.22 gambaran APS pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012-2015 :

**Tabel 2.22.**

**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan Menengah**

**Tahun 2012-2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kelompok Usia** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Pendidikan Dasar** |  |  |  |  |
| 7-12 tahun | 96.705 | 98.364 | 99.793 | 99.220 |
| 13-15 tahun | 88.578 | 91.062 | 93.288 | 96.210 |
|  |  |  |  |  |
| **Pendidikan Menengah** |  |  |  |  |
| 16-18 tahun | 76.035 | 77.132 | 86.812 | 82.310 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa APS untuk pendidikan dasar maupun menengah di Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2015 relatif mengalami peningkatan dari tahun 2012. Hal ini menunjukan keinginan dari masyarakat penduduk Kabupaten Padang Pariaman untuk mendapatkan pendidikan dan arti pentingnya pendidikan bagi masa depan selalu meningkat setiap tahunnya.

* + - * 1. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, ditampilkan melalui tabel 2.20 berikut ini :

**Tabel 2.23**

**Perkembangan APM**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Angka Partisipasi Murni** |  |  |  |  |  |  |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 97.09 | 93.02 | 91.88 | 93.86 | 92.10 | 99 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 72.96 | 72.19 | 63.34 | 60.40 | 73.24 | 78 |
| Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C | 53.04 | 59.31 | 60.77 | 64.65 | 72.66 | 70 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 mencapai 99 % dan ditingkat SMP/MTS sudah mencapai 78%. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK kondisi APM mencapai 70. APM untuk pendidikan dasar maupun menengah di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan dari tahun 2010.Namun persentase APM untuk SD/MI/Paket A menunjukkan angka cukup tinggi.hal ini menunjukkan Anak –anak untuk rentang Umum 7-12 tahun masih menempuh pendidikan Dasar.Sementara masyarakat dalam rentang umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun masih banyak belum menempuh pendidikan sesuai tingkat pendidikannya dengan berbagai kendala yang ada.

* + - * 1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2011-2015. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.24 di bawah ini:

**Tabel 2.24**

**Perkembangan APK**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Angka partisipasi kasar** |  |  |  |  |  |  |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | 105.89 | 105,22 | 105,84 | 111,65 | 107.67 | 113.00 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | 82.25 | 95.57 | 85.28 | 71.01 | 93.76 | 85 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C | 65.54 | 73.19 | 80.98 | 83.73 | 67.17 | 91 |

*Sumber:* Dinas *Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, 2015*

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 mencapai 113 % dan ditingkat SMP/MTS sudah mencapai 85%. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK kondisi APM mencapai 91. Hal ini menunjukkan bahwa APM untuk pendidikan dasar maupun menengah di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan dari tahun 2010.Khusus untuk APK tingkat pendidikan dasar yang melebihi 100% menunjukkan bahwa adanya Siswa yang rentang umurnya melebihi standart umur untuk menempuh tingkat pendidikan dimaksud tapi masif menunjukkan kasadaran akan pentingnya pendidikan masih tinggi walaupun ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi seperti kemudahan mendapat akses pendidikan ditingkat dasar.

* + - 1. **Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah**

Dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar, pemerintah kabupaten Padang Pariaman senantiasa menyediakan sarana fasilitas pendidikan. Pembangunan sekolah baru tentunya harus mempertimbangkan keberadaan anak usia sekolah yang berada pada wilayah tersebut. Dalam melihat keterbandingan jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah dapat dilihat angka rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah seperti yang tertera dalam tabel 2.25 berikut ini :

**Tabel 2.25**

**Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Dasar Menengah**

**Tahun 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kelompok Usia** | **Jumlah Sekolah** | **Jumlah Penduduk Usia Sekolah** | **Rasio Ketersediaan Sekolah** |
| Pendidikan Dasar (Usia-7-12) | 416 | 52.930 | 78,59 |
| Pendidikan Menengah (Usia 13-18) | 64 | 48.699 | 13,14 |

*Sumber : Data Olahan Bappeda Kab. Padang Pariaman, 2016*

Dari tabel 2.25 diatas memperlihatkan Rasio Ketersediaan sekolah Pendidikan dasar sebesar 78,59 yang berarti 78 atau 79 sekolah tingkat pendidikan dasar tersedia untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar di Kabupaten Padang Pariaman.Sedangkan Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Menengah sebesar 13,14 yang berarti 13 atau 14 Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar tersedia untuk 10.000 Pendududk Usia Pendidikan Menengah di Kabupaten Padang Pariaman.Hal ini menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi diantara tingkatan Pendidikan dimaksud.Untuk itu perlu adanya pembangunan sekolah tingkat pendidikan Menengah untuk mengimbangi ketersediaan sekolah dengan jumlah calon murid.

* + - 1. **Rasio Guru Terhadap Murid**

Penunjang keberhasilan program pendidikan akan sangat tergantung ketersediaan tenaga pengajar/guru. Keterbandingan jumlah guru dan murid dapat dilihat dari besaran rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar dan atau menengah per 1000 jumlah murid pendidikan dasar dan atau menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru terhadap muridnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat dilihat pada tabel 2.26 di bawah ini :

**Tabel 2.26.**

**Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

**Tahun 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kelompok Usia** | **Jumlah Guru** | **Jumlah Murid** | **Rasio Ketersediaan Guru dan Murid** |
| Pendidikan Dasar | 4.124 | 55.124 | 74,81 |
| Pendidikan Menengah | 2.180 | 20.687 | 105,38 |

*Sumber : Data Olahan Bappeda Kab. Padang Pariaman, 2016*

Dari tabel 2.26 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2015 pada pendidikan dasar, satu orang guru mendidik 75 murid, sedangkan untuk pendidikan menengah, satu orang guru mengajar sebanyak 106 orang. Padahal sesuai dengan PP 74 tahun 2008 tentang Guru, untuk TK, RA, atau yang sederajat memiliki rasio 15:1; untuk SD atau yang sederajat 20:1; untuk MI atau yang sederajat 15:1; untuk SMP atau yang sederajat 20:1; untuk MTs atau yang sederajat 15:1; untuk SMA atau yang sederajat 20:1; untuk MA atau yang sederajat 15:1; untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan untuk MAK atau yang sederajat 12:1. Hal ini membuktikan kita di Kabupaten Padang Pariaman masih memerlukan tambahan tenaga pendidik disamping masih belum adanya pemerataan Guru ditiap daerah.

* + - 1. **Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa profesi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta meiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat sesuai dengan jenis, jenajng san satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Persyaratan tersebut diharapakan meningkatkan kualitas belajar mengajar.

Berikut tabel 2.27 mengenai perkembangan persentase Guru tingkat pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Pariaman

**Tabel 2.27.**

**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 85.11 | 86.11 | 70.00 | 87.29 | 86.35 | 89,23 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, 2016*

Dari tabel 2.27 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2015 Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Padang Pariaman mengalami Kenaikan dari tahun 2010 yaitu 89,23.hal ini menunjukkan bahwa mutu Guru di Kabupaten Padang Pariaman yang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya akan tetapi masih perlu ditingkatkan fungsi UKG sebagai salah satu syarat untuk mengukur kualitas Guru serta memaksimalkan fungsi LPTK di daerah.

* + - 1. **Angka Kelulusan Sekolah (AL)**

Angka Kelulusan Sekolah (AL) dan Angka Putus Sekolah (APS) juga mempengaruhi nilai IPM. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Banyak faktor yang jadi penyebab dari ketidak tercapaiannya rata-rata Lama sekolah selama 12 tahun, antara lain persepsi masyarakat tentang pendidikan, yang dianggap belum menjanjikan, serta mahalnya biaya pendidikan menjadi kendala selanjutnya.Untuk angka kelulusan Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini :

**Tabel 2.28**

**Angka Kelulusan Sekolah**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Angka Kelulusan:** |  |  |  |  |  |  |
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 99.58 | 99.84 | 98.83 | 99.13 | 100.00 | 100 |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 99.88 | 98.35 | 97.94 | 99.50 | 100.00 | 100 |
| Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | 98.70 | 95.59 | 99.68 | 97.02 | 99.95 |  |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 96.15 | 97.68 | 99.42 | 94.46 | 96.00 | 98.21 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 121.52 | 79.67 | 84.68 | 75.95 | 86.66 | 88.12 |
| Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 85.11 | 86.11 | 70.00 | 87.29 | 86.35 | 89.23 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

**Tabel 2.29**

**Angka Putus Sekolah**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Angka Putus Sekolah:** |  |  |  |  |  |  |
| Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.14 |
| Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.18 | 0.18 | 0.35 |
| Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | 6.05 | 0.77 | 0.72 | 0.42 | 0.34 | 0.34 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

Dari tabel 2.28 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2015 Angka kelulusan sekolah di Kabupaten Padang Pariaman relatif cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman sudah baik disamping faktor lain yang mendukung capaian dimaksud. Akan tetapi ini berbanding terbalik dengan Angka putus sekolah yang relatif tinggi seperti yang terlihat pada table 2.29. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor penghambat masyarakat untuk menikmati layanan Pendidikan seperti faktor ekonomi,geografis daerah dan lain-lain.

* + 1. **Urusan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Adapun perkembangan pelayanan urusan Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.30**

**Perkembangan Kinerja Daerah Bidang Kesehatan**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KESEHATAN** |  |  |  |  |  |  |
| Rasio posyandu per satuan balita x 1000 | 14.00 | 18.61 | 17.38 | 14.28 | 21.76 | 21.76 |
| Rasio puskesmas per satuan penduduk x 1000 | 0.0620 | 0.0623 | 0.06 | 0.06 | 0.0620 | 0.0620 |
| Rasio pustu per satuan penduduk x 1000 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| Rasio polindes/poskesri per satuan penduduk x 1000 | 0.149 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk x 1000 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| Rasio dokter per satuan penduduk x 1000 | 0.14 | 0.137 | 0.210 | 0.124 | 0.119 | 0.119 |
| Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 | 1.72 | 0.185 | 0.163 | 0.174 | 0.077 | 0.077 |
| Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | 58.56 | 72.56 | 71.73 | 74.96 | 34.29 | 80.00 |
| Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | 87.81 | 86.07 | 89.71 | 87.38 | 85.00 | 87.00 |
| Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 85.00 | 87.92 | 71.25 | 72.30 | 84.00 | 90.00 |
| Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 74.50 | 80.32 | 81.27 | 74.92 | 76.50 | 80.00 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 96.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui pengembangan jamkesmas dan jemkesda | 70.00 | 100.00 | 164.69 | 222.03 | 263.19 | 263.19 |
| Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 49.98 | 68.16 | 164.69 | 222.03 | 263.19 | 263.19 |
| Cakupan kunjungan bayi (%) | 85.10 | 62.41 | 86.08 | 84.92 | 65.00 | 70.00 |
| Cakupan puskesmas (%) | 141.18 | 141.18 | 147.06 | 147.06 | 147.06 | 147.06 |
| Cakupan pembantu puskesmas (%) | 34.25 | 32.88 | 23.87 | 23.42 | 15.32 | 15.32 |
| Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar dari RS (Net Death Rate=NDR= Angka kematian neto) 2.5% | 0.00 | 2,5% | 0,06% | 0,52% | 0.03 | 0.03 |
| Waktu Tunggu pasien di rawat jalan < 60 menit | 60 menit | >60menit | >60menit | >60menit | 40 menit | 30 menit |
| Angka kematian Umum untuk setiap 1.000 penderita keluar RS (Gross Death Rate=GDR 4.5%) | 0.00 | 2,31% | 0,375% | 0,795% | 0.05 | 0.05 |
| Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%) | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien (>90%) | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| Persentase limbah cair & padat RS yang memenuhi baku mutu (BOD <30 mg/l,COD <80 mg/l,TSS < 30 mg/l dan PH 6 -9) mencapai (100%) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Angka pemanfaatan Tempat Tidur RS (Bed occupancy Rate=BOR) (60% – 85%) | 85.00 | 0.04 | 0.13 | 9.80 | 0.65 | % |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman, 2015*

* + - 1. **Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Kesehatan Masyarakat (UKBM) yang dikelaola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan [engembangan/pilihan. Kegiatan utama mencakup : kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana; imunisasi; gizi: serta pencegahan dan penanggulangan diare. Semua anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar yang ada di Posyandu terutama : bayi dan anak balita; ibu hamil; ibu nifas; dan ibu menyusui; pasangan usia subur serta pengasuhan anak.

Salah satu upaya untuk mengurangi angka kematian dan kematian anak balita adalah dengan melakukan pemeliharaan kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan anak balita dititikberatkan kepada upaya pencegahan peningkatan kesehatan dan pada pengobatan dan rehabilitasi. Pelayanan kesehatan anak balita ini dapat dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, polindes terutama di posyandu. Untuk rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini :

**Tabel 2.31.**

**Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Rasio Posyandu Per Satuan Balita | 18.61 | 17.38 | 14.28 | 21.76 | 21.76 |

*Sumber : Data Olahan Bappeda Kab. Padang Pariaman, 2016*

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2015 Rasio Posyandu persatuan Balita mengalami kenaikan dari tahun 2011 yaitu 21,76.Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 posyandu melayani 22 orang balita dari 1000 balita yang ada. Hal ini masih dirasa sangat jauh dari kondisi Ideal mengingat pentingnya peran posyandu dalam menyiapkan generasi yang berkualitas.Untuk diadakan Revitalisasi Posyandu dimasa yang akan datang.

* + - 1. **Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)**

Angka kematian bayi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2011 ialah sebesar 7 per 1000 kelahiran. Tahun 2014 angka kematian bayi mengalami kenaikan menjadi 64 per 1000 kelahiran hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.32 di bawah ini :

**Tabel 2.32**

**Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Angka kelangsungan hidup bayi | 993.00 | 993.53 | 993.82 | 100.50 | 992.94 | 993.00 |
| Angka usia harapan hidup | 70.90 | 69,01 | 69,38 | 69,44 | 69.44 | 69.44 |
| Persentase gizi buruk dan Gizi kurang | 13.30 | 11.80 | 12.65 | 12.90 | 10.08 | 11,00 |
| Persentase Cakupan Pelayanan gizi buruk | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.32 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2015 Angka kelangsungan hidup Bayi menunjukkan kenaikan dari tahun 2010 yaitu 993. Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Padang Pariaman masih tergolong cukup tinggi yakni sebesar 7 dari 1000 Kelahiran.Untuk itu perlu ditingkatkan program yang mendukung layanan terhadap Ibu hamil dan melahirkan guna menekan resiko kematian bayi saat persalinan.

* + - 1. **Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan poenduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Adapun perkembangan Angka usia harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabell 2.33 berikut ini.

**Tabel 2.33**

**Angka Usia Harapan Hidup**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Angka usia harapan hidup | 70.90 | 69,01 | 69,38 | 69,44 | 69.44 | 69.44 |
| Persentase gizi buruk dan Gizi kurang | 13.30 | 11.80 | 12.65 | 12.90 | 10.08 | 11,00 |
| Persentase Cakupan Pelayanan gizi buruk | 100,00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.33 di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2015 Angka usia harapan hidup menunjukkan kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 yaitu sebesar 69,44. Hal ini juga menunjukkan jaminan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

* + 1. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pekerjaan Umum

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya agar dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.

Jalan merupakan faktor pendukung utama pembangunan, baik pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya maupun infrastruktur lain. Sampai dengan tahun 2015 terdapat panjang jalan 2.240,35 km yang terdiri dari jalan Negara 84,3 km, jalan provinsi 83,65, jalan kabupaten 2.072,4 km .

Sejak tahun 2010 dalam rangka mengantisipasi perkembangan volume lalu lintas yang ditandai dengan bertambah padatnya arus lalu lintas pada jalur jalan Negara Padang- Bukittinggi setiap tahunnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merintis pembangunan jalan lingkar dari Duku menuju Sicincin dan Jalan Sicincin - Malalak . Dan dalam rangka mengantisipasi arus lalu lintas menuju ibu kota kabupaten terutama dari kota Pariaman menuju Paritmalintang maka dilakukan pelebaran jalan terutama dari Simpang Pauh Kambar menuju Simpang Paritmalintang. Disamping itu untuk meningkatkan lingkungan permukiman yang tertata, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan pembangunan dan pembenahan jalan lingkungan termasuk saluran lingkungannya.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2011 s/d 2015 dapat terlihat dari tabel 2.34 dibawah ini ;

**Tabel 2.34**

**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PEKERJAAN UMUM** |  |  |  |  |  |  |
| Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) | 32.87 | 34.29 | 46.82 | 48,73 | 50.79 | 55.43 |
| Rasio Jaringan Irigasi (%) | 62.25 | 66.20 | 67.00 | 68.30 | 69.72 | 71.00 |
| Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| Persentase rumah tinggal bersanitasi | 11,19 | 11.19 | 12.63 | 13.97 | 35 | 47 |
| Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 67,51 | 69,55 | 71,57 | 73,59 | 75,58 | 78,54 |
| Rasio rumah layak huni | 52,35 | 56,55 | 65,35 | 78,25 | 82,25 | 85,66 |
| Rasio permukiman layak huni | 35.00 | 35 | 35 | 37.00 |  |  |
| Panjang jalan dilalui Roda 4 | 616,25 km | 629,97 Km | 1009.85 Km | 909,85 | 1039.45 km | 1050.00 |
| Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) | 427,85 km | 687 Km | 605,33 Km | 609.45 km | 743.5 km | 526.70 km |
| Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) | 1285M' | 37.49 | 49.07 | 36.15 | 4139 | 4139 |
| Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) | 65 | 64.42 | 72.37 | 73.45 | 83 | 86 |
| Persetase Gedung Kantor yang terbangun di kawsan Ibukota Kabupaten | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.3 |
| Panjang jalan yang dibangun (km) | 18 | 13 | 20 | 42 | 30 | 40 |
| Panjang Peningkatan Jalan Kabupaten |  | 13 | 20 | 42 | 58.7 | 32 |
| Panjang jalan yang terpelihara secara rutin (km) | 100 |  |  | 125 | 585.5 | 600 |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.34 diatas menunjukkan bahwa kecendrungan perkembangan jalan kondisi baik mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya walaupun tidak begitu signifikan hanya rata-rata sebesar 6 %. Rasio Jaringan Irigasi merupakan perbandingan antara panjang jaringan irigasi dengan luas Area Persawahan yang diairi, mengalami peningkatan pertahunnya sebesar 1 %. Persentase Rumah yang bersanitasi meningkat secara signifikan pada tahun 2014 dan tahun 2015. Melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat, serta Program Kabupaten sehat dilkukan Pemicuan Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat (BABS). Sehingga Rumah yang bersanitasi pada tahun 2015 sudah mencapai 47 %. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan penduduk hingga pada tahun 2015 yakni 75,84. Pada saat ini Kabupaten Padang Pariaman hanya memiliki 2 (dua) TPS yakni terletek diwilayah utara yakni Padang Olo Kecamatan Sungai Limau dengan luas 2 (dua) hektar dan Di di Ladang Laweh di Kecamatan Sicincin dengan luas 4(empat) Hektar. Untuk masa mendatang kapasitas dari TPS tersebut perlu dikembangkan lagi agar mampu menampung Penambahan timbulan sampah dikabupaten Padang Pariaman .

* 1. Urusan Penataan Ruang

**Tabel 2.35**

**Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PENATAAN RUANG** |  |  |  |  |  |  |
| Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | 615 | 655 | 705 | 745 | 805 | 855 |
| Jumlah bangunan ber- IMB per satuan bangunan | 126 | 151 | 165 | 166 | 110 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.35 diatas menunjukkan bahwa Rasio Luas Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB cendrung mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2015, dimana pada tahun 2010 adalah 615 dan terus meningkat tiap tahun hingga pada akhir 2015 adalah 855. Jumlah bangunan ber- IMB per satuan bangunan dilihat dari table cendrung mengalami peningkatan dari tahun 2010 tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan.

* + 1. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Urusan perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib. Pembangunan perumahan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri, namun demikian pemerintah tetap berkewajiban dan terus mengupayakan keterlibatan dan peranan yang lebih aktif dari masyarakat dalam pembangunan perumahan, baik melalui swasta, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Hasrat masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki dan atau menempati rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat merupakan sasaran dan mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dilihat dengan dianggarkannya melalui dana APBD untuk membantu pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak tahun 2011 s/d 2015. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berupaya untuk meraih program pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan agar semakin besar lapisan masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi yang dilengkapi dengan sarana pelayanan dasar seperti air bersih dan listrik.

Pada tabel 2.36 berikut ini dapat dilihat perkembangan perumahan masyarakat yang menggunakan air bersih, listrik dan rumah layak huni.

**Tabel 2.36**

**Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PERUMAHAN** |  |  |  |  |  |  |
| Rumah tangga pengguna air bersih/ Jumlah seluruh RT x 100% | 48 | 49,03 | 64,45 | 64,5 | 64,7 | 66,7 |
| Terbangunnya jaringan air bersih (%) | 0.1 | 16,10 | 19,88 | 25,65 |  |  |
| Rumah tangga pengguna listrik Persentase | 85.75 | 90.08 | 93.79 | 93.79 |  | 84,38 |
| Rumah tangga ber-Sanitasi layak (%) | 25.00 | 25.60 | 31.85 | 24.38 | 63,79 | 64,9 |
| Lingkungan pemukiman kumuh (%) | 30.00 | 14.80 | 11.36 | 24.38 |  |  |
| Rumah layak huni (%) | 50 | 49,06 | 57,85 | 79.5 |  |  |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman*

Dari Tabel 2.36 diatas dapat dilihat bahwa Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dari tahun 2010 s/d tahun 2015 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 cakupan Rumah tangga Pengguna air bersih sebesar 48 % hingga pada tahun 2015 sudah mencapai 62 %, terjadi kenaikan sebesar 14 %. Hal ini dipenuhi melalui Dana DAK, Program Pamsimas dan Dana APBN melalui pembangunan jaringan Air Bersih perpipaan s/d 2014 yaitu 19,35 %. Dan Rumah Tangga Pengguna Listrik jika dibandingkan antara tahun 2010 dengan 2015 terjadi penurunan sebesar 1,49 %, dimana pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan sekitar 3% pertahun. Sementara untuk Rumah Layak Huni dari tahun 2010 s/d 2015 meningkat cukup bagus dengan rata-rata peningkatan 9,32 % dan peningkatan yang sangat menonjol terjadi antara tahun 2012-2013 sebasar 21,65 %.

**2.3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini diletakkan dalam suatu arah kebijakan dan prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, meningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat serta meningkatan kualitas kehidupan berpolitik dan hukum. Secara Nasional Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pendayagunaan dan mengoptimalkan seluruh potensi masyarakat. Adapun perkembangan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.37. berikut ini

**Tabel 2.37**

**Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI** |  |  |  |  |  |  |
| Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 1 Keg | 1 Keg | 0 | 2 Keg | 2 Keg | 2 Keg |
| Kegiatan pembinaan politik daerah | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Angka kriminalitas | 28 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Jumlah demo | 1 kasus | 1 kasus | 1 kasus | 1 kasus | 1 kasus | 1 kasus |

*Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman*

Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri pada beberapa Indikator pada umumnya mengalami kenaikan seperti adanya penurunan angka kriminalitas yang merupakan suatu keberhasilan dari segi capaian Kinerja.seterusnya untuk 3 Indikator lainnya tidak menunjukkan peningkatan karena angka pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan angka pada tahun selanjutnya relatif sama.

**2.3.6 Urusan Sosial**

Yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu kondisi yang terlahir dari sebuah keadaan masyarakat yang tidak ideal, atau definisi masalah sosial yaitu keditaksesuaian unsur-unsur masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelomok sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal, maksudnya selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata maka masalah sosial akan tetap selalu ada didalam kehidupan.Objek dari penyandang masalah ini disebut sebagai Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun perkembangan Urusan Sosial Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini.

**Tabel 2.38**

**Capaian Kinerja Urusan Sosial**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **SOSIAL** |  |  |  |  |  |  |
| Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| PMKS yg memperoleh bantuan sosial | 25,351 | 4,521 | 5125 | 18845 | 35,665 | 38,027 |
| Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial | 56,358 | 4,521 | 5125 | 18845 | 35,665 | 84,537 |

*Sumber : Dinsos Naker Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.52 diatas dapat dilihat bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2015 mengalami peningkatan dari segi jumlah dari tahun 2010 yaitu 38.027 orang. hal ini berbanding lurus dengan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 84.537 dari 56.358 pada tahun 2010.

**2.3.7 Urusan Ketenagakerjaan**

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang professional dan produktif. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem informasi pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Permasalahan yang dihadapi pada bidang ketenagakerjaan antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, masih rendahnya produktivitas pekerja/buruh serta masih belum maksimalnya penerapan UMK. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kasus pekerja anak, dan sebagainya, juga turut mewarnai bidang ketenagakerjaan. Belum lagi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga, juga menuai banyak masalah karena minimnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan ketenagakerjaan memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Untuk itu penyelesaiaan masalah ketenagakerjaan diarahkan untuk dilaksanakan secara sistematis dan efektif dengan tidak hanya dititikberatkan pada peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja tetapi juga penciptaan ketenangan dan kenyamanan berusaha. Adapun perkembangan Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.39. berikut ini

**Tabel 2.39**

**Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KETENAGAKERJAAN** |  |  |  |  |  |  |
| Angka partisipasi angkatan kerja | 34.73 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 2076 | 52.09 |
| Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 1.30 | 1.2 | 1.15 | 1.1 | 1.05 | 1.00 |
| Tingkat partisipasi angkatan kerja | 64.48 | 64.34 | 63.36 | 61.19 | 2076 | 2.39 |
| Pencari kerja yang ditempatkan | 796 | 876 | 955 | 1035 | 438 | 438 |
| Tingkat pengangguran terbuka | 13.51% | 6.43 | 7.31 |  | 11.00% | 11.00% |
| Keselamatan dan perlindungan | 70% | 0.77 | 0.84 | 84% | 90% | 90% |
| Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | 22.10 | 18 | 16 | 14 | 13.00 | 13.00 |
| Jumlah Pengangguran/mencari Pekerjaan | 23,411 | 23,411 | 23,411 | 23,411 | 15,016 | 15,016 |

*Sumber : Dinsos Naker Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.52 diatas dapat dilihat bahwa Angka partisipasi Angkatan Kerja mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu 52,09% dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 34,73%. Hal ini memberikan gambaran tentang penduduk Padang Pariaman yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari tahun 2015.Dari segi iklim ketenagakerjaan telah mengalami perbaikan hal ini dapat dilihat pada angka sengketa pengusaha dengan pekerja yang dari tahun ketahun telah mengalami penurunan kasus.Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka telah mengelami penurunan dari tahun 2010 yaitu 11%. Hal ini dapat diartikan angkatan kerja yang telah diterima bekerja telah mengalami peningkatan.Hal ini berbanding lurus dengan Jumlah Pengangguran/Pencari kerja yang telah mengalami penurunan dari tahun 2015 yakni 15,016% dibanding tahun 2010 sebesar 23,411%.

**2.3.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam Inpres No.9 Tahun 2000, PUG didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakn dan program-program dan kebutuhan peremapuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penganggaran dari semua kebijakan, program dan kegiatan disemua bidang kehidupan. dan juga melalui peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengitegrasikan perbedaan permasalahan-permasalahan, pengalamanpengalaman. Untuk memperkuat Inpres No. 9 tahun 2000 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah. Dalam Kep.Mendagri ini, ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintahan di Propinsi, Kabupaten dan Kota yang pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah di semua tingkatan hingga Kelurahan/Desa. Demikian pula dalam rangka menjalankan fungsi kelurga yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak sesuai dengan hak dan martabatnya diterbitkan undang undang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah menjamin dan melindungi anak dan haknya agar hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2, UU No 23/2002). Adapun perkembangan pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.40**

**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** |  |  |  |  |  |  |
| Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 0.081 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.1 | 0.085 |
| Rasio KDRT (%) | 0.30 | 0.30 | 0.5 | 0.34 | 0.35 | 0.22 |
| Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 26 orang | 30 orang | 40 orang | 30 orang | 68 orang | 25 orang |

*Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.49 diatas dapat dilihat bahwa Persentase Partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah sudah tinggi . Artinya dari segi jumlah keterwakilan wanita dalam Pemerintahan sudah cukup besar. Untuk Rasio KDRT di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 mengalami penurunan.Akan tetapi Angka tersebut masih belum bisa menjadi patokan pasti bahwa kejadian KDRT sudak berkurang, hal ini masih kejadian yang laporannya sudah sampai pada P2TP2A sedangkan kemungkinan masih ada kejadian yang tidak terdeteksi. Begitu juga dengan jumlah pengaduan perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang juga mengalami penurunan dari tahun 2010 walaupun tidak terlalu signifikan. Oleh sebab itu masih perlu sosialisasi tentang aturan-aturan yang mengatur tentang KDRT seperti Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

**2.3.9 Urusan Pangan**

Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Dilihat dari pengertiannya bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dimaksud ada beberapa indikator yang bisa diukur sebagaimana terlihat pada tabel 2.41 dibawah ini.

**Tabel 2.41**

**Capaian Kinerja Urusan Pangan**

**Tahun 2010 - 2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KETAHANAN PANGAN** |  |  |  |  |  |  |
| Regulasi Ketahanan Pangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tumbuhnya Kelembagaan Distribusi dan Konsumsi Pangan Masyarakat | 15 | 25 | 35 | 57 | 78 | 80 |
| Jumlah Produksi beras (000/Ton) | 136,8 | 153 | 162,5 | 148,8 | 151,1 | 155,7 |
| Jumlah desa mandiri pangan | 2 | 2, 2 | 1 moratorium 5 | 5 | 5 | 5 |

*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman*

**2.3.10 Urusan Lingkungan Hidup**

Dalam urusan lingkungan hidup yang terkait dalam hal ini adalah penanganan persampahan, cakupan pelayanan air minum, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk, Penegakkan hukum Lingkungan Pertanahan, Penyelesaian Kasus Tanah Negara dan Penyelesaian Izin Lokasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.42 dibawah ini.

**Tabel 2.42**

**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **LINGKUNGAN HIDUP** |  |  |  |  |  |  |
| Persentase penanganan sampah | 25% | 30% | 32% | 39% |  |  |
| Persentase Luas pemukiman yang tertata | 20 | 20 | 30 | 40 |  |  |
| Pencemaran status mutu air yang ditangani | 0 | 48.4 | 65.9 | 71.1 | 77% | 95,38% |
| Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dan UKL-UPL |  | 64.5% | 51.4% | 44.7% | 82% | 58,85% |
| Jumlah Tempat pembuangan sampah (TPS) | 20 | 100% | 100% | 100% |  |  |

*Sumber : Kantor LH Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase penangan sampah dari tahun 2010 meningkat rata-rata 0,04 % yang didukung dengan 2 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di Padang Olo Kecamatan Sungai Limau untuk menampung sampai belahan utara Kabupaten Padang Pariaman dan di Ladang Laweh Untuk TPS yang menampung sampah belahan selatan dan Timur Wilyah Kabupten Padang Pariaman.

**2.3.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus objek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap akan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik.

Gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data-informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Perwujudan suatu sistem memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kinerja pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dewasa ini belum memuaskan. Masih kurangnya kinerja pelayanan masyarakat tersebut dampaknya sangat besar terutama terhadap bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat pada era reformasi sekarang ini semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik, sedangkan Pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat belum mampu memenuhi tuntutan tersebut.  
UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23/2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2006 tentang Adminduk. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Adapun perkembangan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.43 berikut ini.

**Tabel 2.43**

**Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** |  |  |  |  |  |  |
| Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | 0.59 | 0.8 | 0.95 | 0.97 | 0.76 | 0.97 |
| Kepemilikan KK | 0.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kepemilikan akta catatan sipil | 0.55 | 0.65 | 0.95 | 0.85 | 0.57 | 0.9 |
| Ketersediaan database kependudukan | 0.55 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 100 |

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio Penduduk Ber-KTP persatuan Penduduk tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 0,97. Angka dimaksud menunjukkan masyarakat diusia > 17 tahun atau sudah menikah sebahagian besar sudah memiliki KTP. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah untuk memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki KTP.Hal ini juga didukung dengan Data Kepemilikan KK dan Akta Catatan Sipil yang sudah mendekati dan mencapai 100%.

**2.3.12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jika dilihat dari skill masyarakat indonesia kurang baik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat Adapun perkembangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut ini.

**Tabel 2.44**

**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & NAGARI** |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 2 | 46 | 92 | 138 | 60 | 60 |
| Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Swadaya terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Persentase peningkatan kemampuan Nagari dan Pengurus Nagari | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| Jumlah Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang terbentuk dan berfungsi dengan baik | 0 | 17 | 34 | 50 | 1 | 1 |
| PKK aktif | 64 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Jumlah Posyandu | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Posyandu Purnama dan Mandiri | 156 | 296 | 396 | 486 | 586 | 696 |

*Sumber : BPMPKB Kabupaten Padang Pariaman*

Berdasarkan tabel 2.55 diatas dapat kita lihat secara keseluruhan capaian mengalami peningkatan dari tahun 2010.peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada Indikator Posyandu Purnama dan Mandiri yang pada tahun 2010 sebesar 156 Posyandu menjadi 696 pada tahun 2015 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 400%. Sedangkan Indikator-indikator lain mengalami kenaikan yang relatif kecil yang berarti butuh perhatian lebih pada tahu-tahun yang akan datang.

**2.3.13 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Keluarga berencana menurut Undang-Undang no 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepeduliandan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturankelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagiadan sejahtera. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Adapun perkembangan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut ini.

**Tabel 2.45**

**Capaian Kinerja Urusan Keluarga dan Keluaraga Sejahtera**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA** |  |  |  |  |  |  |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga | 3.4 | 3.32 | 3.31 | 3.31 | 2.9 | 2.9 |
| Rasio akseptor KB (%) | 64.00 | 58.00 | 58.00 | 60.00 | 66 |  |
| Cakupan peserta KB aktif (%) | 64.00 | 58.00 | 58.00 | 60.00 | **66.00** |  |
| Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%) | 59.00 | 45.00 | 38.00 | 35.00 | **40.00** |  |

*Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.50 diatas dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman dapat ditekan.ini terbukti dengan Rata-rata jumlah anak perkeluarga yang dapat ditekan setiap tahunnya dari yang awalnya 3,4 pada tahun 2010 menjadi 2,9 pada tahun 2015. Hal ini berbanding lurus dengan rasio akseptor KB serta Cakupan peserta KB yang mengalami peningkatan pada tahun 2015.Untuk Indikator Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I mengrangi Penurunan setiap tahunnya. Ini menunjukkan peningkatan status keluarga dari Keluarga Prasejahtera dan Keuarga Sejahtera I menjadi lebih baik.

**2.3.14 Urusan Perhubungan**

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana di Kabupaten Padang Pariaman penekanan pelayanannya mulai tahun 2010 s/d 2015 hanya pada layanan transportasi darat menyangkut layanan angkutan jalan raya. Penyelenggaraan urusan perhubungan ini juga didorong oleh kestrategisan letak Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan jalur lalu lintas jalan negara yang dilalui oleh Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), disamping Angkutan Desa dan Angkutan Kota lainnya. Guna mendukung kelancaran angkutan tersebut penyediaan terminal orang dan terminal barang yang layak serta kondisi jalan yang baik yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas yang memadai merupakan suatu keharusan yang mesti disediakan oleh Pemerintah Padang Pariaman. Adapun perkembangan pelayanan urusan perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.46 berikut ini.

**Tabel 2.46**

**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PERHUBUNGAN** |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah arus penumpang angkutan umum | 580,442 | 529.894 | 567.228 | 520,162 | 530.200 | 450.751 |
| Rasio ijin trayek | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | 2734 |
| Jumlah uji keur angkutan umum | 3,650 | 2,120 | 2,376 | 2449 | 4,649 | 5,751 |
| Jumlah Terminal Bis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Pelabuhan Laut | - |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Bandar Udara (Bandara) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100% | 14.50 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | 8.57 |
| Kepemilikan KIR angkutan umum | 2,014 | 2,120 | 2,376 | 2449 | 2,512 | 2,576 |
| Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan |
| Biaya pengujian kelayakan angkutan umum | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 53,500 | 61,000 | 61,000 |
| Pemasangan Rambu-rambu | 213 | 409 | 585 | 936 | 1351 | 696 |

*Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.38 diatas dapat dilihat bahwa Rasio Izin Trayek dari tahun 2010 s/d 2015 meningkat 13,34 dan Tingkat Kepemilikan/Kelulusan KIR Angkutan Umum juga meningkat rata-rata 1,12 % per tahun, sementara Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas rata-rata juga meningkat 96 %, namun sejak tahun 2010 s/d 2015 angkutan umum darat di Kabupaten Padang Pariaman baru ditunjang dengan 2 terminal penumpang/barang tipe C.

Disamping perhubungan angkutan jalan raya sebagaimana tersebut diatas, di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2006 sudah ditunjang dengan adanya pelabuhan udara Banda Internasional Minang Kabau yang berefek sangat signifikan terhadap kenaikan PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Dan dalam rangka pengembangan urusan perhubungan di Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun-tahun mendatang sedang diupayakan pembangunan jalur perhubungan laut dengan pembangunan Dermaga di Pantai Tiram Kecamatan Ulakan Tapakis.

.

**2.3.15 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dimana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan. Adapun perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.47**

**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah jaringan komunikasi | 94 | 106 | 109 | 112 | 127 | 127 |
| Rasio wartel terhadap penduduk 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Rasio warnet terhadap penduduk 10000 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Jumlah surat kabar nasional/lokal | 0.021 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Web site milik pemerintah daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman*

**2.3.16 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, namun sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat. Ada 3 indikator kinerja daerah yang diukur disini seperti ; keaktifan koperasi, jumlah UMKM dan jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom yang dapat dilihat pada tabel 2.48 berikut ini.

**Tabel 2.48**

**Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH** |  |  |  |  |  |  |
| Persentase koperasi aktif (%) | 70.95 | 74.44% | 74.56% | 74.78% | 74.78% | 75,51% |
| Jumlah UMKM (000) | 30.971 unit | 10,404 | 10,814 | 10,902 | 10,902 | 11,021 |
| Jumlah Koperasi yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom | 31 unit | 37 | 38 | 38 | 38 | 46 |

*Sumber : Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.39 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan koperasi aktif rata-rata dari tahun 2011 s/d 2015 hanya mencapai 0,27% sementara pertumbuhan UMKM hanya rata-rata mencapai 1,5 %, begitu juga dengan jumlah koperasi yang melaksanakan unit simpan pinjam cendrung stagnan dan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu 8 koperasi. Banyak hal yang mempengaruhi perkembangan koperasi dan UMKM ini seperti permasalahan interen menyangkut sumbedaya manusia, pengorganisasian, kesulitan permodalan dan masih banyak pula anggapan negatif, pandangan pesimis sebagian masyarakat  terhadap peran dan fungsi koperasi. Semua ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945  pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Untuk itu diperlukan tindakan kongkrit untuk reformasi total, baik dalam cara pandang, maupun dalam mengelola koperasi secara baik dan benar karena koperasi yang telah maju dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya, karena koperasi-koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dikurangi.

**2.3.17 Urusan Penanaman Modal**

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya investasi diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta (Private Investment) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana untuk kinerja daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap investasi PMA dan PMDN serta bagaimana serapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 2.49 dibawah ini.

**Tabel 2.49**

**Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 19 | 347 | 347 | 250 | 233 | 26 |
| Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 242M | 250 | 160 | 193 | 61 | 134,67 |
|
| Rasio daya serap tenaga kerja | 211.57 | 13.90 | 13.90 | 24.08 | 15.11 | 111.77 |
| Jumlah Tenaga Kerja yang terserap | 4.020 | 4.822 | 4.822 | 6.021 | 3,520 | 2.906 |

*Sumber : BPMP2T Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.40 diatas dapat dilihat bahwa kecendrungan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2010 hingga 2015 rata-rata mengalami kenaikan 1,75 perusahaan/tahun atau sekitar 0,14 % per tahun. Namun kalau dilihat perkembangan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan terutama mulai tahun 2013 s/d 2015, dan yang paling signifikan penurunan terjadi pada tahun tahun 2015 sebanyak 207 perusahaan atau sekitar 88,84 %. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah nilai investasi yang ditanamkan oleh perusahaan baik PMDN maupun PMA sangat bertolak belakang atau berbanding terbalik dengan jumlah investor yang melakukan investasi di Kabupaten Padang Pariaman seperti pada tahun 2014, dimana dengan jumlah investor 233 hanya tercatat investasi sebesar Rp. 61 Milyar, sementara di tahun 2015 dengan jumlah investor 26, nilai investasinya mencapai Rp. 134,67 Milyar. Setelah ditelusuri ternyata hal ini disebabkan karena ketidak tepatan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Dan selanjutnya capaian indikator terhadap rasio daya serap tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang terserap seperti pada tabel diatas dari tahun 2011 s/d 2014 pada umumnya hampir sebanding, namun di tahun 2015 terjadi kontradiksi, dimana dengan Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap 2.906 ternyata Rasio Daya Serap Tenaga Kerja mencapai 111.77 %, hal ini sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tarik terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal yang juga penting diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makro ekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Selain itu kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Sejalan dengan hal tersebut, sudah dilakukan berbagai kegiatan melalui BPMP2T yang salah satunya seperti : meningkatkan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi melalui penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

**2.3.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pembnaan terhadap urusan pemuda dan olah Raga. Jumlah Organisasi olah Raga terus mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2011 yakni 3 buah sampai tahun 2015 yakni 40 buah . Dan juga jumlah gelanggang olah Raga ajuga mengalami peningkatans secara signifikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Kegiatan Kepemudaan terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 berjumalah 6 bh sampai dengan tahun 2015 berjumlah 9 bh. Perkembangan capaian Kinerja urusang Pemuda dan Olah Raga tahun 2011-2015 dapat dilihat pada table 2.50 dibawah ini.

**Tabel 2.50**

**Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah organisasi pemuda | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10 |
| Jumlah organisasi olahraga | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 40 |
| Jumlah kegiatan kepemudaan | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Jumlah kegiatan olahraga | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 104 |
| Lapangan olahraga | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 259 |
| a.     Rasio klub olahraga/penduduk | 0.275 | 0.275 | 0.277 | 0.277 | 0.280 | 0.040 |
| b.     Rasio gedung olahraga | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.000 | 0.000 |

*Sumber : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman*

**2.3.19 Urusan Statistik**

**Tabel 2.51**

**Capaian Kinerja Urusan Statistik**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **STATISTIK** |  |  |  |  |  |  |
| Buku ”kabupaten dalam angka” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Buku ”PDRB kabupaten” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman*

**2.3.20 Urusan Kebudayaan**

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negative bagi perkembangan budaya local, pemerinyah berkewajiban membuat kebijakan – kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah. Dalam pembangunan bidang kebudayaan, Kabupaten Padang Pariaman memprioritaskan Program pengembangan nilai budaya yaitu Pembinaan, Pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya. Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan local dalam event-event baik yang berskala kecamatan, Kabupaten maupun Nasional. Dan juga pelestarian terhadap Benda, Status dan Kawasan cagar Budaya juga perlu dilakukan Dari tabel 2.52 dibawah ini dapat dilihat perkembangan capaian kinerja Urusan Kebudayaan dari tahun 2011-2015.

**Tabel 2.52**

**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KEBUDAYAAN'** |  |  |  |  |  |  |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 4x | 4x | 4x | 4x | 1X | 4X |
| Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 4 lokasi | 4 lokasi | 4 lokasi | 4 lokasi | 2 lokasi | 2 lokasi |
| Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 3 buah | 3 buah | 3 buah | 5 buah | 5 buah | 20 buah |
| Rasio grup kesenian/10.000 penduduk | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.32 | 0.50 |
| Rasio gedung kesenian/ 10.000 penduduk | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

*Sumber : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.41 diatas dapat dilihat bahwa beberapa indikator mengalami penurunan seperti intensitas Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang tidak menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 yang awalnya 4 kali hingga akhir tahun RPJMD sebanyak 4 kali penyelenggaraan. Kemudian Pembangunan sarana Penyelengaraan seni dan budaya yang ditahun 2010 terdapat pada empat lokasi dan tidak menunjukkan peningkatan hingga tahun 2015 sebanyak 4 lokasi. Begitu juga dengan Rasio grup kesenian per-10.000 penduduk yang perlu peningkatan karena adanya penurunan pada tahun 2010 sebsar 0.73 dan turun pada tahun 2015 menjadi 0.50. dari beberapa indikator yang telah dijelaskan diatas kita mengharapkan adanya upaya maksimal dari SKPD terkait nantinya supaya lebih merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran guna meningkatkan capaian secara kese;uruhan pada urusan Kebudayaan ini.

**2.3.21 Urusan Perpustakaan**

Perustakaan adalah suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pemakainya.

Namun, saat ini pengertian tradisional dan paradigma lama mulai tergeser seiring perkembangan berbagai jenis perpustakaan, variasi koleksi dalam berbagai format memungkinkan perpustakaan secara fisik tidak lagi berupa gedung penyimpanan koleksi buku.

Banyak kalangan terfokus untuk memandang perpustakaan sebagai sistem, tidak lagi menggunakan pendekatan fisik. Sebagai sebuah sistem perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian yang terintergrasikan melalui sistem yang dipakai untuk pengolahan, penyusunan dan pelayanan koleksi yang mendukung berjalannya fungsi – fungsi perpustakaan.

Perkembangannya menempatkan perpustakaan menjadi sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Dari istilah pustaka, berkembang istilah pustakawan, kepustakaan, ilmu perpustakaan, dan kepustakawanan. Adapun perkembangan Urusan perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini:**Tabel 2.53**

**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PERPUSTAKAAN** |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah perpustakaan | 1 pustaka daerah, 1 pustaka nagari | 1 Pustaka daerah, 37 pustaka nagari | 1 Pustaka daerah,14 pustaka nagari | 1 Pustaka daerah, 10 pustaka nagari | 1 Pustaka daerah,60 pustaka nagari, 5 perpustakaan TBM, 5 perpustakaan Pesantren | 1 Pustaka daerah,60 pustaka nagari, 5 perpustakaan TBM, 7 perpustakaan Pesantren, 6 Perpustakaan mesjd, 2 perspustakaan sekolah |
| Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%) | 16.7 | 20 | 23 | 25 | 35 | 40 |
| Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 1844 eks | 2294 | 2583 | 2998 | 7699 | 8456 |

*Sumber : Kantor Arpus Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel diatas dapat kita analisa bahwa secara keselurahan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pada urusan Perpustakaan mengalami kenaikan yang cukup besar seperti pada indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami kenaikan sebesar lebih kurang 600% yaitu dari 1844 exemplar pada tahun 2010 menjadi 8456 exemplar pada tahun 2015. Begitu juga dengan iandikator Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun yang mengalami kenaikan lebih kurang 200% dari tahun 2010 sebesar 16,7% menjadi 40% pada tahun 2015.

**2.3.22 Urusan Kearsipan**

Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Mengingat arti pentingnya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal ini terbukti dengan diperlukannya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang kearsipan Nasional. Adapun perkembangan Urusan Kearsiapan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.54**

**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **KEARSIPAN** |  |  |  |  |  |  |
| Pengelolaan arsip secara baku (%) | 33.33 | 40 | 70 | 46 | 86 | 80 |
| Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 50 0rang | 65 | 83 | 90 | 100 | 80 |

*Sumber : Kantor Arpus Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel capaian diatas dapat kita lihat bahwa Pengelolaan arsip secara baku pada Kantor Perpustakaan dan arsip mengalami kenaikan yang pada tahun 2010 dengan capaian 33,33% selanjutnya pada tahun 2015 menjadi 80% .Begitu juga dengan SDM pengelola kearsipan juga mengalai Kenaikan dari tahun 2010 uang hanya sebesar 50 orang dan tahun 2015 menjadi 80 orang namun secara keseluruhan masih perlu dicetak tenaga arsiparis yang bersertifikat.

**2.3.23 Urusan Pariwisata**

Sektor pariwisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang cukup penting mempunyai peran dalam memacu pembangunan. Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya potensi destinasi wisata di Kabupaten Padang Pariaman, apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi sektor yang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini dimungkinkan karena sektor pariwisata dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk itu pembangunan kepariwisataan harus memberi perhatian pada pariwisata alternatif, seperti pariwisata minat khusus dan pariwisata yang berbasis komunitas seperti adventure travel, cultural travel dan ecotourism. Pengembangan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan adanya peningkatan promosi wisata juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan .

Dalam RPJMD 2010-2015 telah ditegaskan bahwa arah kebijakan urusan kepariwisataan adalah pengembangan industry pariwisata yang berdaya saing, melalui pengembangan kemitraan, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata. Adapun indikator kinerja daerah tentang Pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.55 berikut dibawah ini :

**Tabel 2.55**

**Capaian Kinerja Urusan Pariwisata**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PARIWISATA** |  |  |  |  |  |  |
| Kunjungan wisata (jumlah orang) | 3,133 | 3,968 | 4,147 | 3,100 | 4,293 | 4,379 |
| Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB |  | 20,000. | 22,000. | 24,000. | 28,000. | 28,000 |

*Sumber : Disparpora Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.43 diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisata dari tahun 2010 s/d 2015 rata-rata 3 % , meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan 25 % darii tahun 2012, yang diiringi dengan peningkatan konstribusi terhadap PDRB rata-rata 10 % pertahun.

**2.3.24 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

Terkait dengan upaya penuntasan kebutuhan listrik masyarakat dusun telah dilakukan kegiatan Pengadaan Jaringan Listrik Perdesaan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan semakin meluasnya jangkauan pelayanan energi listrik bagi masyarakat, dampak yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah meningkatnya anggota masyarakat yang bisa menikmati listrik. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Padang Pariaman dari 78.679 di tahun 2011 menjadi 89.687 di tahun 2015. Demikian pula dengan daya yang dibutuhkan, dimana pada tahun 2011 tercatat 83.036 watt naik menjadi 108.246 watt pada tahun 2015. Dalam pemenuhan kebutuhan akan listrik bagi masyarakat miskin/kurang mampu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program bantuan listrik untuk KK miskin melalui dana APBD. Disamping itu masyarakat juga diupayakan memanfaatkan sumber listrik dari energi terbarukan dan mikro hidro seperti, biogas dan lain sebagainya serta upaya pemerintah untuk memperoleh bantuan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupa listrik tenaga surya. Adapun sebagai gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.56**

**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah Pelanggan Listrik |  | 78.769 | 100.438 | 103.234 | 85.620 | 89.687 |
| Jumlah Daya Listrik |  | 83.036 | 102.582 | 112.250 | 55.734 | 108.246 |
| Pertambangan tanpa ijin (%) | 5.88% | 9.95% | 20.52% | 52.61% | 52.61% | 40.00% |
| Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%) | 3.53% | 3.41% | 3.37% | 3.33% | 3.33% | 3.10% |

*Sumber : Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.44 diatas dapat terlihat bahwa jumlah pelanggan listrik mengalami kenaikan pada tahun 2012 dan 2013, dan di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 17.614 pelanggan yang diiringi dengan perobahan daya listrik pada tahun yang sama.

Untuk pertambangan tanpa ijin mengalami peningkatan dari tahun 2010 s/d 2013, dimana kenaikan pertambangan tanpa izin tersebut secara signifikan terjadi pada tahun 2013 mencapai 42,09 %, sementara kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB selalu mengalami penurunan 0,0043 %/tahun. Hal ini merugikan pada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu kiranya penindakan yang tegas dari pemerintah daerah kepada masing-masing penambang liar dimaksud agar kekayaan daerah yang ditambang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan ppemerintah kabupaten Padang Pariaman.

**2.3.25 Urusan Perdagangan**

Urusan perdagangan merupakan salah satu pembangunan ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Sektor perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung dan eceran tradisional dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil usaha kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik. Untuk indikator kinerja daerah urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut ini.

**Tabel 2.57**

**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PERDAGANGAN** |  |  |  |  |  |  |
| Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 10.67% | 11.37% | 10.93% | 10.79% | 10.79% | 10.90% |
| Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 33% | 33.02% | 40.58% | 61.84% | 61.84% | 67.00% |
| Rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu | 7.58 | 6.62 | 8.60 | 6.50 | 6.50 | 5.00 |

*Sumber : Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.47 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak begitu signifikan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 0,70 % dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalami penurunan. Sementara cakupan bina kelompok pedagang/usaha normal cenderung menunjukkan kenaikan rata-rata 6,8 %/tahun. Sedangkan rata-rata ratio koefisien variasi harga komoditi tertentu juga sangat fluktuatif dan jika dibandingkan antara tahun 2010 dengan 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 2,58 %.

**2.3.26 Urusan Perindustrian**

**Tabel 2.58**

**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian**

**Tahun 2011-2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **PERINDUSTRIAN** |  |  |  |  |  |  |
| Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 11.17% | 10.63% | 10.35% | 10.11% | 10.11% | 11.21% |
| Pertumbuhan Industri | 2.50% | 3.18% | 3.01% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |

*Sumber : BPMP2T Kabupaten Padang Pariaman*

Dari tabel 2.45 diatas dapat terlihat bahwa Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami fluktuasi seperti pada tahun 2010 s/d 2014 mengalami penurunan dari 11,17% menjadi 10,11%. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami kanaikan dari 10,11% menjadi 11,21% pada tahun 2014. Hal ini berbanding lurus dengan tren pertumbuhan industry yang hanya mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2011 dan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2012 dan tetap pada tiga tahun terakhir.

**2.4 Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan**

Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan merupakan embrio dari semua pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Perencanaan adalah basis dalam mencapai suatu tujuan karena perencanaan merupakan arahan dan pedoman kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Rencana pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan yang memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal yang dalam pelaksanaannya menggunakan 5 pendekatan yaitu ; teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariiaman Tahun 2016-2021 dimana prioritas pembangunan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam semua bidang pemerintahan dengan mewujudkan sistem perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkatan penyelenggara pemerintahan terbawah sampai pada tingkatan kabupaten merupakan proses penggalian gagasan atau ide dari seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam mewujudkan Good Governance.

Dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan perencanaan masih terdapat kendala dan permasalahan, yaitu: belum efektifitasnya koordinasi dan hasil perencanaan pem -bangunan daerah; belum seimbangnya perencanaan sosial budaya dengan perencanaan ekonomi maupun prasarana perwilayahan sumberdaya alam; belum efektifitasnya pelaksanaan musrenbang; dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk mendukung proses perencanaan.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan Daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, dimana Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan RPJMD Tahun 2010-2015 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2011 yang merupakan periode kedua dari RPJPD. Sementara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam hal ini ukuran capaian kinerja perencanaan pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan dokumen Fungsi Penunjang Urusan perencanaan pada daerah tersebut, baik dokumen perencanaan bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Adapun dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.59 berikut ini.

**Tabel 2.59**

**Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** |  |  |  |  |  |  |
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) | 80 | 80 | 91.3 | 91.00 | 90,38 | 90,38 |
| Persentase Peningkatan kualitas musrenbang | 60 | 50 | 52 | 56 | 60 | 65 |
| Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD | 50 | 74 | 74 | 80 | 85 | 90 |
| Peningkatan Kualitas SDM perencanaan | 55 | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 |

*Sumber : Bappeda Kabupaten Padang Pariaman*

Pada urusan Perencanaan Pembangunan rata-rata pencapaian kinerja tetap stabil sesuaii indikator yang diukur, namun singkronisasi antara Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD terjadi peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2010 hanya 80 % dan tahun 2015 menjadi 90,38 %. Hal ini berarti dalam penyusunan RKPD sudah mengacu pada RPJMD.

**2.4.1 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian**

Sebagai salah satu fungsi dan peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka berdasarkan urusan desentralisasi yang dikelola, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Adapun perkembangan Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.60. berikut ini:

**Tabel 2.60**

**Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian**

**Tahun 2011-2015**

| **Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Awal RPJMD Tahun 2010** | **Capaian Kinerja** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** |  |  |  |  |  |  |
| Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 16 orang | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Jumlah Pos Siskamling | 366 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Penegakan PERDA (%) (Penyelesaian Pelanggaran Perda) | 55 | 55 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Cakupan patroli petugas Satpol PP | 1 /12 jam | 1 /12 jam | 1 /12 jam | 1 /12 jam | 1 /12 jam | 1 /12 jam |
| Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | 65 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 |
| Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten | 567 orang | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Sistim Informasi Manajemen Pemda | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | Tidak | tidak | ada | ada | ada | ada |

*Sumber : Kantor SatPol PP Kabupaten Padang Pariaman*

Untuk capaian kinerja pada masa periode RPJMD yang lalu sesuai dengan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian belum mengalami peningkatan kecuali pada Indikator Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah yang mengalami peningiatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 2 dan pada tahun 2013 sebesar 5 serta Indikator Jumlah Pos Siskamling yang pada tahun 2010 sebanyak 366 Poskamling pada tahun 2013 menjadi 732 Poskanling yang berarti setiap korong diwilayah Kabupaten Padang Pariaman rata-rata telah memiliki Poskamling.

**2.5. Aspek Daya Saing Daerah**

**2.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah**

**2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**

Konsumsi Rumah tangga sangat mempengaruhi dalam perhitungan PDRB. menurut lapangan usaha pada tahun 2011 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.61 berikut ini :

**Tabel 2.61**

**Pengeluaran Rata-Rata per Kapita sebulan   
Kabupaten Padang Pariaman Periode 2010-2015**

| **Kelompok Pengeluaran** |  | **Tahun** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015\*\*** |
| Konsumsi Rumah Tangga |  |  |  |  |  |  |
| - Makanan ( juta ) | 303.517 | 352.259 | 408.026 | 437.401 | 453.400 | 453.400 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - Non Makanan ( juta ) | 205.514 | 175.530 | 284.308 | 269.574 | 293.683 | 293.683 |
| Produk Domestik Regional Brutto ( trilyun ) | 8,27 | 9,43 | 10,64 | 12,28 | 14,41 | 14,41 |

*Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, PDRB Menurut Penggunaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2015*

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman.

**2.5.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan**

Sejak tahun 2011 konsumsi non-makanan memiliki proporsi yang lebih besar daripada konsumsi makanan.

**2.5.2. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**

**2.5.2.1. Luas Wilayah terkena banjir**

Berkaitan dengan penanganan lokasi banjir dan genangan air, tahun   
2015 di Kabupaten Padang Pariaman masih terdapat 8 ( delapan ) Kecamatan yang belum teratasi masalah banjir. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan dan di musim hujan menimbulkan banjir. Luas area yang terkena banjir di Kabupaten Padang Pariaman di setiap tempat bervariasi antara 0,5 Ha sampai 25 Ha. Total Luas lahan terkena banjir tahun 2013 mencapai 24 Ha dengan frekuensi/lama genangan antara 6-18 hari pertahun. Topografi Kabupaten Padang Pariaman, serta perkembangannya secara horizontal dan vertikal sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan teknologi drainase yang baik.

**2.5.2.2. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran**

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 81 Restoran dan ...... yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

**2.5.2.3. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel**

Terdapat 4 ( empat ) hotel Melati di Kabupaten Padang Pariaman, ditambah dengan beberapa penginapan/losmen/hostel yang tersebar di seluruh Kabupaten Padang Pariaman mendorong datangnya berbagai kelas turis domestik maupun asing dapat menyesuaikan kebutuhan akomodasi mereka dengan dana yang mereka miliki.

**2.5.2.4. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik**

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015, dari 89.514 rumah   
tangga di Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 85.620 rumah tangga atau 95,64% telah menggunakan listrik PLN. Sementara sisanya sebanyak 3.894 rumah tangga atau 4,36% menggunakan listrik non-PLN ataupun tidak/bukan menggunakan listrik sama sekali untuk penerangan tempat tinggal mereka.

**2.5.3 Iklim Berinvestasi**

**2.5.3.1. Angka Kriminalitas**

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Untuk lebih lengkapnya masalah hukum dan kasusu kriminal di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.62 dan 2.63 di bawah ini :

**Tabel 2.62**

**Masalah Hukum di Wilayah**

**Tahun 2011-2015**

| **Perkara Hukum** | **Tahun** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| 1. Jumlah Perkara Dilaporkan : \* |  |  |  |  |  |
| 1). Pidana | 992 | 960 | 936 | 848 | 848 |
| 2). Perdata | 46 | 63 | 1.329 | 708 | 708 |
| 3). Politik dan HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4). Lalu Lintas | 120 | 137 | 315 | 278 | 278 |
| 5). Perlindungan perempuan dan anak | 0 | 0 | 12 | 84 | 84 |
| 2. Jumlah Perkara Terselesaikan: \* |  |  |  |  |  |
| 1). Pidana | 895 | 925 | 931 | 843 | 843 |
| 2). Perdata | 46 | 60 | 1324 | 703 | 703 |
| 3). Politik dan HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4). Lalu Lintas | 120 | 137 | 315 | 278 | 278 |
| 5). Perlindungan perempuan dan anak | 0 | 0 | 12 | 84 | 84 |
| 3. Jumlah Perkara Tidak Terselesaikan: \* |  |  |  |  |  |
| 1). Pidana | 7 | 35 | 21 | 5 | 5 |
| 2). Perdata | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 3). Politik dan HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4). Lalu Lintas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5). Perlindungan perempuan dan anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

**Tabel 2.63**

**Kasus Kriminal**

**Tahun 2014**

| No | Jenis Pelanggaran | Bulan ( Kasus ) | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
| 1 | Pencurian Pemberatan | 3 | 17 | 16 | 15 | 30 | 10 | 13 | 22 | 17 | 10 | 14 | 11 | 178 |
| 2 | Penculikan | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 56 |
| 3 | Pencurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pencurian Ranmor | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 14 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 86 |
| 5 | Penganiayaan berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pemalsuan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Pembakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Penggelapan | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 59 |
| 10 | Perkosaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Perjudian | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | Perzinaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Pencabulan | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 24 |
| 14 | Perbuatan tidak menyenangkan | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 15 | Pemerasan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 |
| 16 | Penipuan | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 49 |
| 17 | Pengrusakan | 1 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 18 | Kawin Liar | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | Melarikan anak dibawah umur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Perkelahian/pengeroyokan | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 29 |
| 21 | Penghinaan | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 22 | Perampasan hak | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | VCD Bajakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Narkotika | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 26 | Penganiayaan ringan | 11 | 12 | 18 | 14 | 18 | 19 | 21 | 17 | 19 | 12 | 12 | 13 | 186 |
|  | **Jumlah** | **46** | **79** | **67** | **72** | **89** | **79** | **75** | **78** | **75** | **73** | **68** | **47** | **848** |

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Padang Pariaman juga terjadi kriminalitas. Namun secara umum, angka kriminalitas di Kabupaten Padang Pariaman relatif masih rendah. Jumlah gangguan kamtibmas di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2011-2015 cukup tinggi, kemudian mengalami penurunan tahun 2011. Jika tahun 2011 jumlah masalah hukum pidana mencapai 992 kasus, namun pada tahun 2015 turun menjadi 848 kasus. gangguan kamtibmas mencapai 119 kejadian, maka tahun 2015 berkurang menjadi 106 kejadian. Pencurian kendaraan roda 2 merupakan jenis kriminalitas yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Tahun 2015, pencurian kendaraan roda 2 mencapai 86 kejadian. Penipuan juga banyak terjadi antara lain tercatat 49.kejadian penipuan terjadi tahun 2015. Pencurian dengan kekerasan juga termasuk jenis kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu sebab tingginya kriminalitas adalah cukup tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman. Respon warga terhadap kriminalitas ini diantisipasi dengan penjagaan keamanan mandiri secara spontan dalam bentuk penutupan akses ke kawasan permukiman (terutama dari golongan mampu) yang sekaligus menimbulkan kesan eksklusivisme; selain kegiatan simkamling sebagai wujud penjagaan keamanan komunitas.

**2.5.3.2. Lama Proses Perijinan**

Proses perijinan usaha telah menjadi isu utama dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perzinan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Tahun 39 2015 Tentang Standar Operaisonal Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman telah diatur standar waktu pelayanan perijinan yang dikelola oleh BPMP2T yang ditentukan, dapat dilihat pada tabel 2.64 berikut ini :

**Tabel 2.64**

**Standar Waktu Pelayanan Perizinan**

**Di Kabupaten Padang Pariaman**

| **No** | **Jenis Perizinan** | **Waktu Pelayanan (hari)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izin Prinsip | 12 |
| 2 | Izin Lokasi | 12 |
| 3 | IMB | 11 |
| 4 | Izin Reklame | 4 |
| 5 | Izin Gangguan ( HO ) | 12 |
| 6 | Izin Tempat Usaha ( SITU ) | 3 |
| 7 | Izin Pertambangan Daerah ( SIPD ) | 12 |
| 8 | Izin Pertambangan Rakyat ( SIPR ) | 10 |
| 9 | Izin Pemanfaatan Air Tanah ( SIPA ) | 10 |
| 10 | Izin Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Golong C | 10 |
| 11 | Izin Pangkalan Minyak Tanah ( PMT ) | 5 |
| 12 | Izin Pengangkutan, Penjualan, penumpukan Bahan Galian B dan C | 5 |
| 13 | Izin Usaha Penyediaan Ketenaga Listrikan untuk Kepentingan Umum yang dikelola swasta | 5 |
| 14 | Izin Usaha Industri | 7 |
| 15 | Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) | 5 |
| 16 | Izin Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) | 5 |
| 17 | Tanda Daftar Gudang ( TDG ) | 5 |
| 18 | Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) | 10 |
| 19 | Izin Rumah Makan, Bar dan Restoran | 5 |

Dari 19 ( Sembilan ) jenis ijin yang dikelola oleh BPMP2T, ijin yang secara langsung terkait dengan iklim investasi adalah Ijin Gangguan (IG/HO), Ijin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP) serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang seluruhnya menjadi kewenangan BPMP2T. Hingga kini kinerja pelayanan, terutama terkait lama proses perizinan masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Hal ini terlihat dengan banyaknya jumlah keluhan yang menyebut bahwa pelayanan yang ada tidak tepat waktu. Tahun 2015, terdapat 19 keluhan mengenai ketidaktepatan waktu proses perizinan, namun demikian kinerja pelayanan perijinan terpadu satu pintu senantiasa diperbaiki secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama yang terkait perijinan usaha.

**2.5.3.3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Parkir; (7) Pajak Bea Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan (8) Pajak Air Bawah Tanah dan (9) Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.534.415.689,- (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel 2.65 di bawah ini.

**Tabel 2.65**

**Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun Anggaran 2015**

| **No** | **Uraian** | **Realisasi Pendapatan Tahun 2015**  **(Rp)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pajak Hotel | 34,257.727,00 |
| 2 | Pajak Restoran dan Rumah Makan | 640.323.062,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 11.000.000,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 136.204.350,00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 5.363.271.895,00 |
| 6 | Pajak Pengambilan Bahan Galian C | 1.141.858.655,00 |
| 7 | Pajak Parkir | 207.500.000,00 |
|  | **Jumlah** | 7.534.415.689,00 |

*Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015*

Pajak dari penerangan jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Padang Pariaman. BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat, telah beralih menjadi Pajak Daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Padang Pariaman untuk membiayai pembangunan daerahnya. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan; (3) RetribusiPenggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (6) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (7) Retribusi Terminal; (8) Retribusi Rumah Potong Hewan; (9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (10) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (11) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian; (12) Retribusi Ijin Trayek. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3,828,514.885 (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 2.66. berikut ini :

**Tabel 2.66**

**Perincian Pendapatan Retribusi Daerah**

**Tahun Anggaran 2015**

| **No** | **Uraian** | **Tahun Anggaran 2015** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisasi Pendapatan (Rp)** | **Keterangan** |
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 2.379.569.500,00 |  |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 386.483.200,00 |  |
| 3 | Retribusi Perizinan tertentu | 1.062.462.185,00 |  |
|  | **Jumlah** | 3.828.514.885,00 |  |

*Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015*

**2.5.5. Sumber Daya Manusia**

**2.5.5.1. Rasio lulusan S1/S2/S3**

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2011-2015 cukup berfluktuasi.

**2.5.5.2 Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 relatif meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010 Jika tahun 2010 rasio ketergantungan sebesar 70,18%, maka tahun 2014 menurun menjadi 63,46%. Sampai dengan tahun 2015, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami sedikit penurunan, menjadi .....% . Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tanggungan sebanyak 63 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut ini :

**Tabel 2.67**

**Rasio Ketergantungan di Kabupaten Padang Pariaman**

**Periode 2011-2015**

| **No** | **Uraian** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun | 133.248 | 122.810 | 128.120 | 128.179 | 128.179 |
| 2 | Jumlah Penduduk usia > 64 tahun | 30.508 | 21.703 | 29.222 | 29.491 | 29.491 |
| 3 | Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1)&(2) | 163.756 | 144.513 | 157.342 | 156.670 | 156.670 |
| 4 | Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun | 233.306 | 252.370 | 243.548 | 246.860 | 246.860 |
| 5 | Rasio ketergantungan (3)/(4) (%) | 70,18 | 57,26 | 64,60 | 63,46 | 63,46 |

*Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman (diolah)*

Jika dibandingkan dengan tingkat Nasional, rasio ketergantungan di Kabupaten Padang Pariaman memiliki nilai lebih kecil. Kondisi ini membuka kesempatan bagi Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

**2.5.5.3 Indek Pembangunan Manusia ( IPM )**

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatra Barat. Padang Saat ini IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 68,04 dan berada di rangking 12 dari tingkat IPM di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak indikator sumber daya manusia yang belum terpenuhi. Oleh karena itu perlu kerja keras pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Berikut ini Tabel IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Untuk lebih lengkapnya informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.68 dan 2.69 berikut ini :

**Tabel 2.68**

**Indek Pembangunan Manusia ( IPM )**

**Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

**Tahun 2011-2015**

| **No** | **Kabupaten/Kota** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kep. Mentawai | 55,90 | 56,10 | 56,33 | 56,73 | 57,41 |
| 2. | Pesisir Selatan | 65,80 | 66,49 | 67,31 | 67,75 | 68,07 |
| 3. | Solok | 65,28 | 65,62 | 66,15 | 66,44 | 67,12 |
| 4. | Sijunjung | 62,92 | 63,70 | 64,48 | 64,95 | 65,30 |
| 5. | Tanah Datar | 66,92 | 67,29 | 68,12 | 68,51 | 69,49 |
| 6. | Padang Pariaman | 65,89 | 66,20 | 67,15 | 67,56 | 68,04 |
| 7. | Agam | 66,94 | 67,95 | 68,73 | 69,32 | 69,84 |
| 8. | Lima Puluh Kota | 65,20 | 65,87 | 66,30 | 66,78 | 67,65 |
| 9. | Pasaman | 61,57 | 62,26 | 62,91 | 63,33 | 64,01 |
| 10. | Solok Selatan | 64,81 | 65,12 | 65,86 | 66,29 | 67,09 |
| 11. | Dhamasraya | 67,40 | 67,76 | 68,71 | 69,27 | 69,84 |
| 12. | Pasaman barat | 62,55 | 63,33 | 63,92 | 64,56 | 65,26 |
| 13. | Padang | 78,68 | 79,00 | 79,23 | 79,83 | 80,36 |
| 14. | Kota Solok | 74,68 | 75,02 | 75,54 | 76,20 | 76,83 |
| 15. | Sawahlunto | 67,97 | 68,59 | 69,07 | 69,61 | 69,87 |
| 16. | Padang Panjang | 73,76 | 74,22 | 74,54 | 75,05 | 75,98 |
| 17. | Bukittinggi | 76,30 | 76,92 | 77,67 | 78,02 | 78,72 |
| 18. | Payakumbuh | 75,39 | 75,89 | 76,34 | 76,49 | 77,42 |
| 19. | Pariaman | 73,07 | 73,47 | 74,51 | 74,66 | 74,98 |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

**Tabel 2.67**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Peringkat**

**Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015**

| **No** | **Kabupaten/Kota** | **IPM** | **Peringkat** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kepulauan Mentawai | 57,41 | 19 |  |
| 2 | Pesisir Selatan | 68,07 | 11 |  |
| 3 | Kab Solok | 67,12 | 14 |  |
| 4 | Sijunjung | 65,30 | 16 |  |
| 5 | Tanah Datar | 69,49 | 10 |  |
| 6 | Padang Pariaman | 68,04 | 12 |  |
| 7 | Agam | 69,84 | 8 |  |
| 8 | Lima Puluh Kota | 67,65 | 13 |  |
| 9 | Pasaman | 64,01 | 18 |  |
| 10 | Solok Selatan | 67,09 | 15 |  |
| 11 | Dharmasraya | 69,84 | 9 |  |
| 12 | Pasaman Barat | 65,26 | 17 |  |
| 13 | Padang | 80,36 | 1 |  |
| 14 | Kota Solok | 76,83 | 4 |  |
| 15 | Sawahlunto | 69,87 | 7 |  |
| 16 | Padang Panjang | 75,98 | 5 |  |
| 17 | Bukittinggi | 78,72 | 2 |  |
| 18 | Payakumbuh | 77,42 | 3 |  |
| 19 | Kota Pariaman | 74,98 | 6 |  |

*Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2016*

**Tabel T - C.1**

**HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**





















**A**















